

PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

(Studi Kasus : 30 Provinsi)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

NUR TSANIYAH FIRDAUSI
NIM. C2B606037

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nur Tsaniyah Firdausi
Nomor Induk Mahasiswa : C2B606037
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN DI
INDONESIA**
(Studi Kasus : 30 Provinsi)
Dosen Pembimbing : Johanna Maria Kodoatie, SE., Mc., Ph.D

Semarang, 13 September 2010
Dosen Pembimbing,

Johanna Maria Kodoatie, SE, MEc., Ph.D
NIP. 196406121990012001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Nur Tsaniyah Firdausi

Nomor Induk Mahasiswa : C2B606037

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP

Judul Skripsi : PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN DI
INDONESIA

(Studi Kasus : 30 Provinsi)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 23 September 2010

Tim Penguji :

1. Johanna MariaKodoatie, SE., MEc., Ph.D (.....)

2. Dr. Dwisetia Poerwono, MSc (.....)

3. Arif Pujiyono, SE, MSi (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nur Tsaniyah Firdausi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Proyeksi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia (studi Kasus: 30 Provinsi), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 13 September 2010
Yang membuat pernyataan,

(Nur Tsaniyah Firdausi)
NIM : C2B606037

ABSTRACT

Poverty is multi-dimensional concept of human welfare that includes various traditional measures of prosperity. Economic growths and health problems is a key condition for poverty reduction in each regions.

The object of this research is how the results of estimates and projections of poverty levels. In this Research, also discusses the factors that affect poverty, namely GDP per capita and life expectancy, and discusses how they affect poverty levels.

This research aims to analyze the factors that influence the level of poverty. This research uses regression analysis by model Least Square Dummy Variable (LSDV). This usage is aimed to analyze the effect of GDP per capita and life expectancy. With a sample period from the year 2004-2008, this research also attempts to compare the projections between the years 2004-2006 with projections for the period 2004-2008. In each of the projections will be analyzed how the trends in poverty 30 provinces in Indonesia until the year 2015 are formed.

Results of analysis using LSDV is noted that the variable GDP per capita and life expectancy have negative and significant impact on poverty levels. This indicates that these two variables have an inverse relationship to the level of poverty.

Key words: GDP per capita, life expectancy, projections, LSDV

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan konsep multi-dimensi tentang kesejahteraan manusia yang meliputi berbagai ukuran tradisional tentang kemakmuran. pertumbuhan ekonomi dan masalah kesehatan merupakan syarat utama bagi penanggulangan kemiskinan di setiap wilayah.

Objek penelitian ini adalah bagaimanakah hasil estimasi dan proyeksi tingkat kemiskinan. dalam penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yaitu PDRB perkapita dan angka harapan hidup, serta membahas bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi dengan model *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Penggunaan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB perkapita dan angka harapan hidup . Dengan periode penelitian dari tahun 2004-2008, penelitian ini juga mencoba membandingkan proyeksi antara tahun 2004-2006 dengan proyeksi tahun 2004-2008. Pada masing-masing proyeksi akan dianalisis bagaimana tren kemiskinan 30 provinsi di Indonesia hingga tahun 2015 terbentuk.

Hasil analisis dengan menggunakan LSDV diketahui bahwa variabel PDRB perkapita dan angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan.

Kata-kata Kunci : PDRB perkapita, Angka Harapan Hidup, proyeksi, LSDV

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Proyeksi Tingkat Kemiskinan Indonesia** (Studi kasus : 30 Provinsi). Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari pihak lain baik dari segi moral dan materi. Untuk itu sudah sepantasnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H.M. Chabachib, MSi, Akt, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Johanna Maria Kodoatie, SE.,MEc, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dan memberikan arahan bagi penulis selama proses penyusunan skripsi.
3. Bapak. Edy Yusuf Agung Gunanto, SE.,MSc, Ph.D selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam kegiatan akademis selama Penulis belajar di Fakultas Ekonomi UNDIP.
4. Evi Yulia Purwanti, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

5. Seluruh Dosen, staf pengajar, staf administrasi dan TU serta staf keamanan dan pihak-pihak intern Fakultas yang lain yang selama ini membantu proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi.
6. Petugas Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro serta Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan bantuan berupa data dan referensi yang bermanfaat.
7. Ayah dan Ibu (Akhmad Syariffudin & Media Yuni) Orang Tua tersayang yang telah memberikan Do'a, nasehat, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.
8. Kakakku Aulia Hafiizh dan Adik-adikku (Amirah Karimah dan Atikah Ramadhani) yang selalu kusayangi dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. R.Panji Rizqi, SE terima kasih buat semangat dan doanya selama ini.
10. Sahabat-sahabat terbaikku dila, dewi, hilda, dhira, intan, dini, nisa, anna, nike, dian, terima kasih atas persahabatan selama ini, terus berjuang ya.
11. Teman-teman IESP 2006, Ami, Andhika, Ayu, Azzi, Akrom, Adhit, Cahyo, Dhita, Dian, Dini, Doyok, Dyke, Edith, Fajar, Farid, Indra, Tita, Lisna, Mira, Nasrul, Oyk, Pipit, Prima, Rama, Rizal, Rea, Riza, Ridho, terima kasih buat 4 tahun terakhir ini.
12. Kakak-Kakak IESP 2005, Mas Hafid, Mba Prist, Mas Anto, Mba Ruth, terima kasih buat bimbingannya.

13. Teman-teman KKN Sobat Randu, Mas Dhana, Fider, Tara, Mas Iwan, Mas Galih Mba Nora, Teh Ranti, Mba Vina, Mba Pita, Restie, Endah, Idev, terimakasih buat kebersamaan dan kekompakannya.
14. Saudaraku sayang inggit, shinta, putri, ari, doty, anggas, rama terima kasih buat doa dan dukungan kalian selama ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah penulis dari awal sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan sehingga informasi tambahan, saran dan kritik untuk pengembangan lebih lanjut sangatlah penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 September 2010

Penulis

Nur Tsaniyah Firdausi
C2B606037

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan 30 Provinsi Indonesia Tahun 2006-2008.....	5
Tabel 1.2 PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 30 Provinsi Di Indonesia Tahun 2006 -2008.....	7
Tabel 1.3 Angka Harapan Hidup 30 Provinsi di Indonesia Tahun 2004- 2006.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1 Tingkat Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan 30 Provinsi Di Indonesia Tahun 2004 – 2008.....	59
Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 30 Provinsi Di Indonesia Tahun 2004 – 2008.....	62
Tabel 4.3 Angka Harapan Hidup dan Laju Pertumbuhan Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2004 –2006.....	65
Tabel 4.4 Hasil Regresi Utama.....	67
Tabel 4.5 Nilai t-statistic	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Lingkaran Setan Kemiskinan (<i>vicious circle poverty</i>)..... 21
Gambar 3.1	Aturan membandingkan Uji <i>Durbin-Watson</i> Dengan Tabel <i>Durbin Watson</i> 52
Gambar 4.1	<i>Uji Durbin-watson</i> 68

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2004-2015....	77
Grafik 4.2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2015.....	79
Grafik 4.3 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2004-2015..	81
Grafik 4.4 Perbandingan tingkat kemiskinan 2008 dengan Proyeksi Tingkat Kemiskinan tahun 2010.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A : Hasil Regresi Utama.....	94
Lampiran B : Hasil Uji Asumsi Klasik.....	95
Lampiran C : Tabel Auxilliary Regression.....	113
Lampiran D : Proyeksi	115

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Landasan Teori.....	15
2.1.1 Kemiskinan.....	15
2.1.2 Teori Kemiskinan	20
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	21
2.1.4 Teori Pertumbuhan Endogen.....	22
2.1.5 Kesehatan dalam Pembangunan	24
2.1.6 Pengaruh PDRB perkapita terhadap Kemiskinan.....	26
2.1.7 Pengaruh Kesehatan terhadap Kemiskinan.....	27
2.2. Penelitian Terdahulu	29
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis	35
2.4. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Variabel Penelitian dan Deskripsi Operasional Variabel	37
3.2 Jenis dan Sumber Data	38
3.3 Metode Pengumpulan Data	40
3.4 Metode Analisis	41
3.4.1 Model Analisis Regresi Data Panel (<i>Pooled Time Series</i>)	42
3.4.2 Model Penelitian.....	43
3.4.3 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	48
3.4.4 Pengujian Statistik.....	53
3.4.4.1 Uji F	54
3.4.4.2 Uji t.....	54
3.4.5 Koefisien Determinasi R^2	55

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1.	Deskripsi Obyek Penelitian	58
4.1.1	Gambaran Umum	58
4.1.2	Perkembangan Tingkat Kemiskinan	58
4.1.3	Perkembangan PDRB perkapita	60
4.1.4	Perkembangan Angka Harapan Hidup.....	64
4.2	Analisis Data	66
4.2.1	Uji Asumsi Klasik	68
4.2.2	Pengujian Statistik	70
4.2.2.1	Pengujian Hipotesis	70
4.3	Intepretasi Hasil dan Pembahasan	73
4.3.1	Pengaruh PDRB perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan	73
4.3.2	Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan.....	74
4.3.3	Dummy.....	75
4.3.4	Proyeksi Tingkat Kemiskinan	76
BAB V	PENUTUP	88
5.1	Kesimpulan	88
5.2	Keterbatasan	89
5.3	Saran.....	89
	DAFTAR PUSTAKA	91
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari studi ini yang selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang berupa pertanyaan kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian terakhir dalam bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan sering diasosiasikan sebagai masalah bagi negara-negara berkembang yang merupakan sebuah penyakit sosial yang lazim dialami oleh setiap negara yang melaksanakan program pembangunannya. Esensi kemiskinan adalah menyangkut kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan.

Kemiskinan merupakan konsep multi-dimensi tentang kesejahteraan manusia yang meliputi berbagai ukuran tradisional tentang kemakmuran, misalnya pendapatan, kesehatan dan keamanan. Konsumsi rumah tangga dipandang oleh para ahli ekonomi sebagai sebuah rangkuman ukuran umum tentang sumber daya rumah tangga yang tersedia dan karenanya menjadi dimensi yang lebih disukai untuk memulai kajian tentang kemiskinan.

Ada banyak sumber yang dipergunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Bank Dunia mengukur kemiskinan dengan tidak

tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US \$ 1 per hari per kapita. Batas garis kemiskinan Bank Dunia adalah pendapatan perkapita per hari US \$ 1. Sedangkan garis kemiskinan yang digunakan BPS mengacu kepada besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum pangan dan nonpangan.

Berdasarkan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals) yang pertama adalah penanggulangan kemiskinan dan kelaparan masyarakat di dunia. Setiap negara yang menandatangani deklarasi ini harus dapat mengurangi setengah dari penduduknya yang berpenghasilan kurang dari 1 dolar AS sehari dan penduduk yang mengalami kelaparan. Deklarasi ini ditandatangani bulan September tahun 2000. Target pencapaian MDGs hingga tahun 2015, target waktu yang tersisa untuk mengurangi jumlah mereka yang terjerat kemiskinan menjadi separuh, atau sekitar 7,5 persen dari total penduduk kurang dari 7 tahun. Dalam publikasi terakhir Biro Pusat Statistik (BPS, 2007), orang miskin di negeri ini masih berjumlah 16,6 persen atau sekitar 37 juta jiwa. Bisa diprediksi bahwa jumlah tersebut akan kembali merangkak ke atas berbarengan dengan melonjaknya harga BBM yang memicu kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok. Selain itu berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008 jumlah utang luar negeri dan dalam negeri Indonesia yang jatuh tempo atau harus dibayar di tahun 2009-2015 sangat tinggi. Sehingga diperkirakan pencapaian target MDGs tidak bisa terealisasi karena dibutuhkan dana yang lebih untuk pencapaian target tersebut.

Kemiskinan di negara maju sering dikaitkan dengan pengangguran. Dengan berpenghasilan \$ 1 dan \$ 2 perhari, kemiskinan yang ada di sebagian besar negara berkembang menjadi suatu masalah bagi para pekerja miskin. Masalah utama yang dihadapi mereka adalah masalah kualitas pekerja itu sendiri.

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Dalam mengurangi kemiskinan yang berkelanjutan dan adil memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas di kalangan pekerja miskin dalam rangka memfasilitasi pendapatan yang lebih tinggi dan lebih besar keseluruhan tingkat konsumsi.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan sejalan dengan MDGs membutuhkan memprediksi suatu lingkungan yang mendukung di mana kesempatan kerja dan pendapatan para pekerja miskin dapat ditingkatkan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif tertinggal. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat

atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Saeful Hidayat, 2007).

Permasalahan pembangunan di Indonesia ditandai jumlah penduduk miskin yang meningkat tajam menjadi 39,05 juta jiwa (17,75 persen) pada tahun 2006. Penduduk miskin meningkat 3,95 juta jiwa dari tahun sebelumnya dimana sebagian besar penduduk miskin berada di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan karena peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan seperti beras, gula pasir, minyak kelapa, atau telur jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, atau kesehatan (BPS, 2007). Tahun 2007 hingga 2008 tingkat kemiskinan hampir di semua provinsi di Indonesia menurun, hal ini di sebabkan karena kondisi ekonomi yang sudah lebih stabil dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan tingkat inflasi yang cukup stabil (BPS, 2009). Berikut data kemiskinan 30 provinsi di Indonesia tahun 2006 sampai 2008 :

Tabel 1.1
Tingkat Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan
30 Provinsi Indonesia
Tahun 2006-2008

No	Nama Provinsi	2006 (%)	2007 (%)	Laju pertumbuhan (%)	2008 (%)	Laju pertumbuhan (%)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	28,28	26,65	-5,76	23,53	-11,70
2.	Sumatera Utara	15,01	13,90	-7,39	12,55	-9,71
3.	Sumatera Barat	12,51	11,90	-4,87	10,67	-10,33
4.	Riau	11,85	11,20	-5,48	10,63	-5,08
5.	Jambi	11,37	10,27	-9,67	9,32	-9,25
6.	Sumatera Selatan	20,99	19,15	-8,76	17,73	-7,41
7.	Bengkulu	23,00	22,13	-3,78	20,64	-6,73
8.	Lampung	22,77	22,19	-2,54	20,98	-5,45
9.	Kep. Bangka Belitung	10,91	9,54	-12,55	8,58	-10,06
10.	DKI Jakarta	4,57	4,61	0,87	4,29	-6,94
11.	Jawa Barat	14,49	13,55	-6,48	13,01	-3,98
12.	Jawa Tengah	22,19	20,43	-7,93	19,23	-5,87
13.	D.I.Yogyakarta	19,15	18,99	-0,83	18,32	-3,52
14.	Jawa Timur	21,09	19,98	-5,26	18,51	-7,35
15.	Banten	9,79	9,07	-7,35	8,15	-10,14
16.	Bali	7,08	6,63	-6,35	6,17	-6,93
17.	Nusa Tenggara Barat	27,17	24,99	-8,02	23,81	-4,72
18.	Nusa Tenggara Timur	29,34	27,51	-6,23	25,65	-6,76
19.	Kalimantan Barat	15,24	12,91	-15,28	11,07	-14,25
20.	Kalimantan Tengah	11,00	9,38	-14,72	8,71	-7,14
21.	Kalimantan Selatan	8,32	7,01	-15,74	6,48	-7,56
22.	Kalimantan Timur	11,41	11,04	-3,24	9,51	-13,85
23.	Sulawesi Utara	11,54	11,42	-1,03	10,10	-11,55
24.	Sulawesi Tengah	23,63	22,42	-5,12	20,75	-7,44
25.	Sulawesi Selatan	14,57	14,11	-3,15	13,34	-5,45
26.	Sulawesi Tenggara	23,37	21,33	-8,72	19,53	-8,43
27.	Gorontalo	29,13	27,35	-6,11	24,88	-9,03
28.	Maluku	33,03	31,14	-5,72	29,66	-4,75
29.	Maluku Utara	12,73	11,97	-5,97	11,28	-5,76
30.	Papua	41,52	40,78	-1,78	37,08	-9,29

Sumber: Data Statistik Indonesia, diolah.

Berdasarkan tabel 1.1 hampir di semua provinsi, memiliki laju pertumbuhan yang negatif. Hal ini berarti, hampir di setiap provinsi di Indonesia terjadi penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini berbanding terbalik dengan

kemiskinan tahun 2006, sehingga hal ini yang menjadikan alasan mengapa kemiskinan di periode tersebut menarik untuk di teliti lebih lanjut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional (Todaro, 1994).

PDRB perkapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB perkapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Berdasarkan tabel 1.2, PDRB perkapita 30 Provinsi di Indonesia disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.2
PDRB perkapita
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
30 Provinsi Di Indonesia (JUTA RUPIAH)
Tahun 2006 – 2008

No	Nama Provinsi	PDRB per kapita				
		2006	2007	Laju Pertumbuhan (%)	2008	Laju Pertumbuhan (%)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	8.872.800	8.519.100	-3,98	7.938.100	-6,81
2.	Sumatera Utara	7.392.700	7.775.400	5,17	8.140.600	4,69
3.	Sumatera Barat	6.681.000	7.006.000	4,86	7.349.600	4,90
4.	Riau	16.832.400	17.001.200	1,00	17.552.900	3,24
5.	Jambi	4.956.500	5.205.700	5,02	5.486.000	5,38
6.	Sumatera Selatan	7.547.800	7.872.100	4,29	8.155.200	3,59
7.	Bengkulu	4.154.000	4.335.400	4,36	4.479.000	3,23
8.	Lampung	4.293.200	4.485.000	4,46	4.656.200	3,81
9.	Kepulauan Bangka Belitung	8.300.000	8.552.000	3,03	8.805.900	2,96
10.	DKI Jakarta	34.837.500	36.733.100	5,44	38654.200	5,22
11.	Jawa Barat	6.479.700	6.798.600	4,92	7.091.500	4,30
12.	Jawa Tengah	4.690.000	4.913.800	4,77	5.142.800	4,66
13.	D.I.Yogyakarta	5.157.400	5.325.800	3,26	5.538.100	3,98
14.	Jawa Timur	7.329.900	7.800.800	6,42	8.216.800	5,33
15.	Banten	6.634.300	6.902.700	4,04	7.168.100	3,84
16.	Bali	6.443.800	6.752.400	4,78	7.082.100	4,88
17.	Nusa Tenggara Barat	3.696.900	3.813.400	3,15	3.849.800	0,95
18.	Nusa Tenggara Timur	2.376.000	2.450.600	3,13	2.520.000	2,83
19.	Kalimantan Barat	6.029.600	6.284.700	4,23	6.515.200	3,66
20.	Kalimantan Tengah	7.430.600	7.767.300	4,53	8.129.800	4,66
21.	Kalimantan Selatan	7.306.600	7.631.600	4,44	7.990.000	4,60
22.	Kalimantan Timur	32.689.200	32.333.800	-1,08	33.337.000	3,10
23.	Sulawesi Utara	6.222.000	6.559.500	5,42	6.987.500	6,52
24.	Sulawesi Tengah	5.383.000	5.710.700	6,08	6.057.300	6,06
25.	Sulawesi Selatan	5.117.500	5.367.600	4,88	5.707.900	6,33
26.	Sulawesi Tenggara	4.347.300	4.593.500	5,66	4.824.400	5,02
27.	Gorontalo	2.294.400	2.435.900	6,16	2.592.800	6,44
28.	Maluku	2.680.500	2.790.700	4,11	2.867.500	2,75
29.	Maluku Utara	2.539.500	2.648.700	4,30	2.762.400	4,29
30.	Papua	9.318.000	9.525.800	2,23	9.197.600	-3,44

Sumber : Statistik Indonesia,diolah.

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan laju pertumbuhan PDRB perkapita 30 Provinsi di Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 mengalami tren yang meningkat. DKI Jakarta adalah provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi di banding yang lain. Tetapi rata-rata laju pertumbuhannya tidak tetinggi. Sedangkan

Nusa Tenggara Timur adalah provinsi dengan PDRB perkapita terendah, tetapi rata-rata laju pertumbuhannya stabil.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan suatu daerah juga dipengaruhi oleh segi kesehatan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup Saat Lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup di suatu wilayah, maka semakin panjang pula usia harapan hidup bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun tersebut.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Tabel 1.3 menyajikan Angka Harapan Hidup 30 Provinsi Indonesia tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

Tabel 1.3
Angka Harapan Hidup
30 Provinsi di Indonesia
Tahun 2004- 2006
(Tahun)

No	Provinsi	Angka Harapan Hidup				
		2004	2005	laju pertumbuhan (%)	2006	laju pertumbuhan (%)
1.	NAD	67,9	68,0	0,14	68,3	0,44
2.	Sumatera Utara	68,2	68,7	0,73	68,9	0,29
3.	Sumatera Barat	67,6	68,2	0,88	68,5	0,43
4.	Riau	69,8	70,7	1,28	70,8	0,14
5.	Jambi	67,6	68,1	0,73	68,5	0,58
6.	Sumatera Selatan	67,7	68,3	0,88	68,8	0,73
7.	Bengkulu	67,4	68,8	2,07	68,9	0,14
8.	Lampung	67,6	68,0	0,59	68,5	0,73
9.	Bangka Belitung	67,2	68,1	1,33	68,3	0,29
10.	DKI Jakarta	72,4	72,5	0,13	72,6	0,13
11.	Jawa Barat	66,7	67,2	0,74	67,4	0,29
12.	Jawa Tengah	69,7	70,6	1,29	70,8	0,27
13.	DI Yogyakarta	72,6	72,9	0,41	73,0	0,13
14.	Jawa Timur	67,2	68,5	1,93	68,6	0,14
15.	Banten	63,3	64,0	1,10	64,3	0,46
16.	Bali	70,2	70,4	0,28	70,5	0,14
17.	Nusa Tenggara Barat	59,4	60,5	1,85	60,9	0,66
18.	Nusa Tenggara Timur	64,4	64,9	0,77	66,5	2,46
19.	Kalimantan Barat	64,8	65,2	0,61	66,0	1,22
20.	Kalimantan Tengah	69,8	70,7	1,28	70,8	0,14
21.	Kalimantan Selatan	61,6	62,1	0,81	62,4	0,48
22.	Kalimantan Timur	69,7	70,3	0,86	70,4	0,14
23.	Sulawesi Utara	71,0	71,7	0,98	71,8	0,13
24.	Sulawesi Tengah	64,6	65,4	1,23	65,6	0,30
25.	Sulawesi Selatan	68,7	68,7	0	69,2	0,72
26.	Sulawesi Tenggara	66,0	66,8	1,21	67,0	0,29
27.	Gorontalo	64,5	65,0	0,77	65,6	0,92
28.	Maluku	66,2	66,2	0	66,6	0,60
29.	Maluku Utara	63,3	64,2	1,42	64,8	0,93
30.	Papua	65,8	67,3	2,27	67,6	0,44

Sumber : Statistik Indonesia 2007, diolah.

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat Angka Harapan Hidup 30 Provinsi di Indonesia tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Provinsi DI Yogyakarta memiliki angka harapan hidup yang paling

tinggi yaitu sebesar 73 tahun, dengan laju pertumbuhannya 0,13 persen. Tabel 1.3 menunjukkan, bahwa dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 mengalami peningkatan angka harapan hidup, hal ini mengindikasikan pemerintah telah mampu meningkatkan kesehatan di negaranya.

Untuk data Angka Harapan Hidup tahun 2007-2008 diasumsikan konstan pertumbuhannya dari data tahun terakhir, yaitu tahun 2006. Berdasarkan latar belakang di atas maka penting mengetahui bagaimana estimasi tingkat kemiskinan 30 provinsi di Indonesia tahun 2015 mendatang. Selain itu di dalam penelitian ini juga akan melihat bagaimana pengaruh variabel PDRB perkapita dan Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan 30 Provinsi di Indonesia tahun 2004 sampai dengan tahun 2015. Kajian ini akan menggunakan metode data panel, yaitu penggabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Untuk mengolah data panel akan digunakan metode regresi panel data. Untuk membedakan suatu objek dengan objek lainnya akan digunakan variabel semu (*dummy*). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan model regresi dengan metode *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) (Gujarati, 2003).

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam suatu negara. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya jumlah kemiskinan di Indonesia. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Millenium yang pertama yang telah menjadi referensi penting

pembangunan di Indonesia yaitu mengurangi tingkat kemiskinan sampai dengan separuhnya. Kemiskinan di Indonesia semakin lama semakin turun, namun hal ini belum dapat merealisasikan pencapaian target MDGs dalam mengurangi tingkat kemiskinan hingga separuhnya.

Berdasarkan rumusan masalah, beberapa masalah yang telah diidentifikasi yang juga mendukung rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap tingkat kemiskinan 30 Provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap tingkat kemiskinan 30 Provinsi di Indonesia?
3. Bagaimana proyeksi tingkat kemiskinan 30 Provinsi di Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2015?
4. Provinsi apa sajakah yang diproyeksikan mengalami peningkatan dan penurunan tren kemiskinan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan dan kegunaan penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap tingkat kemiskinan 30 Provinsi di Indonesia.

2. Menganalisis bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap tingkat kemiskinan 30 Provinsi di Indonesia.
3. Memproyeksi tingkat kemiskinan 30 Provinsi di Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2015.
4. Menganalisis provinsi apa sajakah yang diproyeksikan mengalami peningkatan dan penurunan tren kemiskinan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai informasi dan evaluasi dalam menanggulangi tingkat kemiskinan.
2. Sebagai referensi bagi peneliti lain, dalam memproyeksi tingkat kemiskinan.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini dapat dipahami secara jelas, maka penulis membagi skripsi ini dalam 5 (lima) bab sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari studi ini yang selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang berupa pertanyaan kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian terakhir dalam bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran dan penentuan hipotesis awal yang akan diuji.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan mengenai hasil analisis dari objek penelitian.

5. Bab V Penutup

Bab ini adalah bab terakhir, bab yang menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan, serta saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menjawab pertanyaan kajian maka diperlukan teori-teori yang terkait untuk mendukung kajian ini. Teori-teori yang terkait antara lain adalah teori kemiskinan dan teori pertumbuhan endogen. Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris tersebut maka dibuatlah kerangka penelitian dan selanjutnya dibuatlah hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara yang perlu dibuktikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan memiliki beberapa definisi, menurut Bank Dunia kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain (kemiskinan absolut). Bank Dunia mengukur kemiskinan absolut sebagai orang yang hidup dengan pendapatan dibawah USD \$1 per hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah \$2 per hari (The World Bank, 2007).

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukanmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse 1953 dalam Kuncoro secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan struktural. Tetapi dalam penulisan ini menggunakan definisi kemiskinan absolut. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

Menurut *Sharp et al. (2000)*, kemiskinan bersumber dari beberapa hal, yaitu:

1. Rendahnya kualitas angkatan kerja.

Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah karena rendahnya kualitas angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja ini bisa dilihat dari angka buta huruf. Sebagai contoh Amerika Serikat hanya mempunyai angka buta huruf sebesar 1%, dibandingkan dengan Ethiopia yang mempunyai angka di atas 50%.

2. Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal.

Kepemilikan modal yang sedikit serta rasio antara modal dan tenaga kerja (*capital-to-labor ratios*) menghasilkan produktivitas yang rendah yang pada akhirnya menjadi faktor penyebab kemiskinan.

3. Rendahnya tingkat penguasaan teknologi.

Negara-negara dengan penguasaan teknologi yang rendah mempunyai tingkat produktivitas yang rendah pula. Tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan terjadinya pengangguran. Hal ini disebabkan oleh kegagalan dalam mengadaptasi teknik produksi yang lebih modern. Ukuran tingkat penguasaan teknologi yang rendah salah satunya bisa dilihat dari penggunaan alat-alat produksi yang masih bersifat tradisional.

4. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Negara miskin sumber daya yang tersedia tidak dipergunakan secara penuh dan efisien. Pada tingkat rumah tangga penggunaan sumber daya

biasanya masih bersifat tradisional yang menyebabkan terjadinya inefisiensi.

5. Pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut teori Malthus jumlah penduduk berkembang sesuai deret ukur sedangkan produksi bahan pangan berkembang sesuai deret hitung. Hal ini mengakibatkan kelebihan penduduk dan kekurangan bahan pangan. Kekurangan bahan pangan merupakan salah satu indikasi terjadinya kemiskinan.

Program-program pemerintah dalam pengentasan Kemiskinan:

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan langsung tunai adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai akibat naiknya harga bahan bakar minyak. Bentuk uang tunai diberikan untuk mencegah turunnya daya beli masyarakat miskin yang disebabkan oleh naiknya harga BBM. Program jangka pendek ini bersifat sementara, diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketergantungan serta tidak mendorong menguatnya *culture of poverty*. Besarnya BLT adalah Rp 100.000 per bulan per rumah tangga sasaran (BAPPENAS, 2005)

2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian

masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan (www.pnpm-mandiri.org)

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank (Joko Retnadi, 2008).

4. Program Raskin

Program Raskin (Program Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program tersebut adalah sebuah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga-rumah tangga miskin sebagai sebuah bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga-rumah tangga miskin melalui distribusi beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/ rumah tangga miskin/ bulan dengan masing-masing seharga Rp 1.600,00 per kg (netto) di titik distribusi. Program ini mencakup seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di Kelurahan dipegang oleh Perum BULOG. Pelaksanaan program Raskin Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak di

beberapa daerah selama ini masih banyak ditemukan berbagai penyimpangan (Tri Wahyuni, 2010).

5. Inpres Desa tertinggal (IDT)

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilandasi oleh Kebijakan Keputusan Presiden (Kepres) No. 3 tahun 1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan telah berjalan sejak 1 April 1994. Program ini secara ideal adalah untuk memberdayakan kaum miskin dan desa tertinggal baik di pedesaan maupun perkotaan. Dari dimensi politis program ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembangunan adalah untuk rakyat, artinya kepedulian pemerintah terhadap kaum tertinggal (penduduk dan desa miskin) bukan sekedar slogan pembangunan (Laporan penelitian Perpustakaan UI, Liswanti Hatta).

6. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

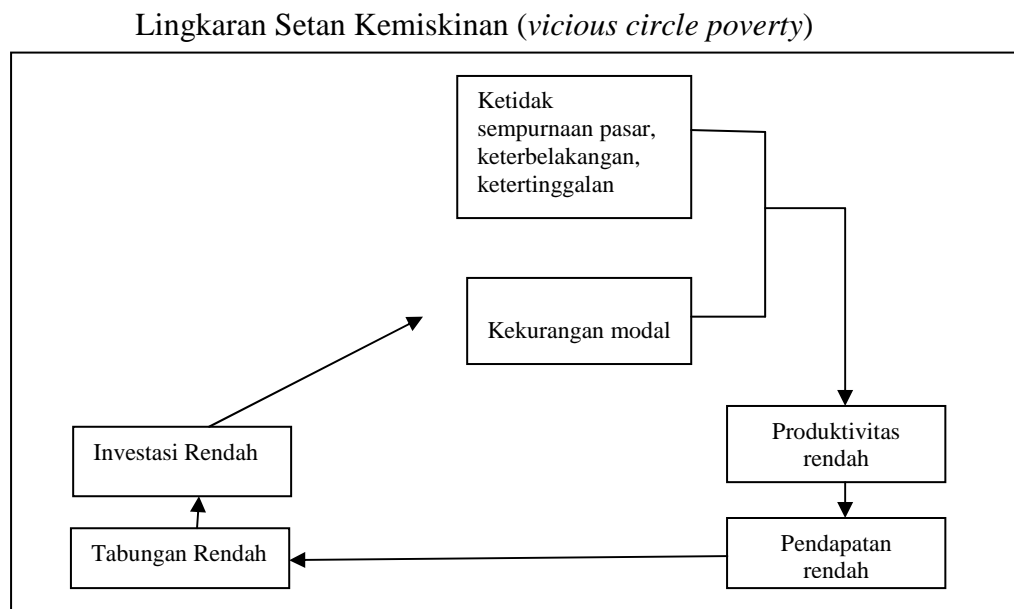
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses rakyat miskin terhadap layanan kesehatan gratis. Program itu nantinya terintegrasi atau menjadi bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan memberi perlindungan sosial dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat (kementerian kesehatan, 2010).

2.1.2 Teori kemiskinan

Penyebab kemiskinan suatu wilayah ini berkonsep pada Teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya

produktivitas sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya (Gambar 2.1). Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1943) yang mengatakan bahwa : “ *a poor country is poor because its poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Gambar 2.1



Sumber : Todaro, 2000

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2000). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi,

harus diperbandingkan pendapatan nasional berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga konstan.

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana pendapatan tahunan individu di suatu daerah tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di wilayah tersebut. Individu yang hidup dibawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah (baik negara atau wilayah yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk wilayah tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengurangi kemiskinan.

2.1.4 Teori Pertumbuhan Endogen

Robert Solow mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang disebut sebagai model pertumbuhan Solow. Model tersebut berangkat dari fungsi produksi agregat sebagai berikut (Dornbusch et al., 2004)

$$Y = A.F(K,L).....(2.1)$$

dimana Y adalah output nasional (wilayah). K adalah modal (kapital) fisik, L adalah tenaga kerja dan A merupakan teknologi. Y akan meningkat ketika input (K atau L, atau keduanya) meningkat. Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan A. Oleh karena itu, pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan

input dan perkembangan kemajuan teknologi yang disebut juga sebagai pertumbuhan total faktor produktivitas.

Share dari setiap input terhadap output mencerminkan seberapa besar pengaruh dari setiap input tersebut terhadap pertumbuhan output. Hubungan ini dapat diperlihatkan oleh persamaan berikut:

$$\text{Output growth} = (\text{labor share} \times \text{labor growth}) + (\text{capital share} \times \text{capital growth}) + \text{technical progress} \dots \dots \dots (2.2)$$

Persamaan 2.2 menunjukkan bahwa perbedaan dalam besarnya sumbangan input- input tertentu terhadap pertumbuhan output di masing-masing negara atau provinsi menyebabkan perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara atau provinsi. Model Solow dapat diperluas sehingga mencakup sumberdaya alam sebagai salah satu inputnya. Dasar pemikirannya yaitu output nasional tidak hanya dipengaruhi oleh K dan L tetapi juga dipengaruhi oleh lahan pertanian atau sumberdaya alam lainnya seperti cadangan minyak. Perluasan model Solow lainnya adalah dengan memasukkan sumberdaya manusia sebagai modal. Dalam literatur, teori pertumbuhan seperti ini terkategori sebagai teori pertumbuhan endogen dengan pionirnya *Lucas dan Romer*. Lucas menyatakan bahwa akumulasi modal manusia, sebagaimana akumulasi modal fisik, menentukan pertumbuhan ekonomi; sedangkan Romer berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat modal manusia melalui pertumbuhan teknologi.

Secara sederhana, dengan demikian, fungsi produksi agregat dapat dimodifikasi menjadi sebagai berikut:

$$Y = A.F(K,H,L).....(2.3)$$

Pada persamaan di atas, H adalah sumberdaya manusia yang merupakan akumulasi dari pendidikan dan pelatihan. Menurut (Gregory Mankiw, 2004) kontribusi dari setiap input pada persamaan tersebut terhadap output nasional bersifat proporsional. Suatu negara yang memberikan perhatian lebih kepada pendidikan terhadap masyarakatnya ceteris paribus akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari pada yang tidak melakukannya. Dengan kata lain, investasi terhadap sumberdaya manusia melalui kemajuan pendidikan akan menghasilkan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apabila investasi tersebut dilaksanakan secara relatif merata, termasuk terhadap golongan berpendapatan rendah, maka kemiskinan akan berkurang.

2.1.5 Kesehatan dalam Pembangunan

Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Keadaan ini terutama terjadi di negara-negara sedang berkembang, di mana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih bekerja secara manual. Di Indonesia sebagai contoh, tenaga kerja laki-laki yang menderita anemia menyebabkan 20% kurang produktif jika dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki yang tidak menderita anemia. Selanjutnya, anak yang sehat mempunyai kemampuan belajar lebih baik dan akan

tumbuh menjadi dewasa yang lebih terdidik. Dalam keluarga yang sehat, pendidikan anak cenderung untuk tidak terputus jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat.

Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (*input*) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit dan peningkatan gizi. Hal ini antara lain terjadi di Inggris selama revolusi industri, Jepang dan Amerika Selatan pada awal abad ke-20, dan pembangunan di Eropa Selatan dan Asia Timur pada permulaan tahun 1950-an dan tahun 1960-an (Laporan Komisi Makroekonomi dan Kesehatan, Desember 2001).

Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur tingkat kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu (BPS, 2005). Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai akibat dari bertambah panjangnya usia sangatlah penting. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat, sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup, seperti halnya dengan tingkat pendapatan tahunan. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Keluarga yang usia harapan hidupnya lebih panjang, cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional dan investasi akan meningkat, dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan.

2.1.6 Pengaruh PDRB perkapita Terhadap Kemiskinan

PDRB menurut BPS adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik.

Nilai bersih tersebut sebenarnya merupakan balas jasa dari faktor yang ikut serta dalam proses produksi yang terdiri dari upah, dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta ditambah dengan penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Balas jasa faktor

produksi, penyusutan dan jasa tidak langsung netto tadi dalam pergerakan sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto sehingga PDRB atas harga pasar tersebut juga merupakan penjumlahan nilai tambah (*value added*) bruto dari seluruh kegiatan ekonomi.

PDRB perkapita diperoleh dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita seringkali digunakan sebagai indikator pembangunan. Pendapatan perkapita biasa memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan (Lincon Arsyad, 1999). Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Tingginya penerimaan daerah, diharapkan nantinya pemerintah daerah tersebut dapat mengatasi masalah kemiskinan daerahnya dengan baik.

2.1.7 Pengaruh Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan. Berbagai indikator kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi, memperlihatkan bahwa angka kesakitan dan kematian secara kuat berkorelasi (Laporan Komisi Makroekonomi dan Kesehatan, 2001).

Beberapa alasan meningkatnya beban penyakit pada penduduk miskin adalah: *Pertama*, penduduk miskin lebih rentan terhadap penyakit karena terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi serta kecukupan gizi. *Kedua*,

penduduk miskin cenderung enggan mencari pengobatan walaupun sangat membutuhkan karena terdapatnya kesenjangan yang besar dengan petugas kesehatan, terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan terbatasnya pengetahuan untuk menghadapi serangan penyakit.

Konsekuensi ekonomi jika terjadi serangan penyakit pada anggota keluarga merupakan bencana jika untuk biaya penyembuhannya mengharuskan menjual aset yang mereka miliki atau berhutang. Hal ini akan menyebabkan keluarga jatuh kedalam kemiskinan, dan jika tidak bisa keluar dari hal ini akan mengganggu tingkat kesejahteraan seluruh anggota keluarga bahkan generasi berikutnya. Serangan penyakit yang tidak fatal dalam kehidupan awal akan mempunyai pengaruh yang merugikan selama siklus hidup berikutnya. Pendidikan secara luas dikenal sebagai kunci dari pembangunan, tetapi masih belum dihargai betapa pentingnya kesehatan anak dalam pencapaian hasil pendidikan. Kesehatan yang buruk secara langsung menurunkan potensi kognitif dan secara tidak langsung mengurangi kemampuan sekolah. Penyakit dapat memelaratkan keluarga melalui menurunnya pendapatan, menurunnya angka harapan hidup, dan menurunnya kesejahteraan psikologis. Menurut Arum Atmawikarta (dikutip dari Laporan Komisi Kesehatan, 2001), inilah yang menjadikan kesehatan memiliki korelasi penting terhadap kemiskinan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kemiskinan di berbagai negara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan daerah dan periode waktu yang berbeda pula, antara lain :

1. Dalam jurnal Stephen Kapsos (2004) yang berjudul "*Estimating growth requirements for reducing working poverty: Can the world halve working poverty by 2015?*" membahas tentang estimasi kemiskinan serta proyeksi besarnya pekerja miskin sampai dengan tahun 2015 di dunia tingkat pertumbuhan GDP. Stephen Kapsos menggunakan variabel tingkat kemiskinan, GDP perkapita, dan angka harapan hidup. Dalam penelitian ini menggunakan panel data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Proyeksi kemiskinan di kalangan pekerja dunia yang disajikan dalam makalah ini mengungkapkan banyak tentang kemungkinan untuk mengurangi kemiskinan sejalan dengan MDGs. Sementara dari hasil proyeksi, kemiskinan di dunia semakin meningkat, sehingga tidak sesuai dengan MDGs yaitu mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyu Winarti (2008) yang berjudul "*Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*" bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh serta dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin Indonesia, hal ini dilakukan karena jumlah penduduk miskin akibat krisis belum berhasil dikurangi bahkan cenderung meningkat. Penelitian ini menggunakan data panel dan variabel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, PDRB, tingkat inflasi, jumlah lulusan tingkat smp, sma, agrishare, industri share, dan dummy krisis. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang mampu mengurangi kemiskinan suatu daerah melainkan efek kebawah (*tickle down effect*).

3. Penelitian Saeful Hidayat (2007) yang berjudul "*Pertumbuhan Ekonomi, Ketidakmerataan Pendapatan dan Kemiskinan: Estimasi Parameter Elastisitas Kemiskinan Tingkat Provinsi Di Indonesia Tahun 1996-2005*" membahas tentang hubungan pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan panel data dan kesimpulannya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketidakmerataan pendapatan, tetapi pertumbuhan ekonomi ini mampu mengurangi kemiskinan, bahkan peningkatan ketidakmerataan pendapatan yang merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi tidak mengganggu efektifitas pengurangan kemiskinan.

Dalam penelitian ini digunakan kajian empiris oleh Stephen Kapsos (2004) sebagai acuan utama penelitian ini. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini terdapat beberapa kesamaan antara lain mengenai topik dan permasalahan yang akan dibahas, tetapi yang membedakan penelitian ini dengan kajian empiris sebelumnya adalah mengenai daerah obyek penelitian dan periode waktu serta dalam penelitian ini yaitu 30 Provinsi di Indonesia pada tahun 2004-2008 selain itu pada penelitian ini membedakan hasil proyeksi kemiskinan menggunakan estimasi tahun 2004 -2006 dengan hasil

proyeksi kemiskinan menggunakan estimasi tahun 2004 -2008. Selain itu dalam penelitian ini akan diestimasi dengan menggunakan data panel dengan metode *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) dan memproyeksikannya dengan menggunakan microsoft excel. Berikut ini adalah ringkasan kajian empiris oleh beberapa penelitian yang digunakan sebagai acuan penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

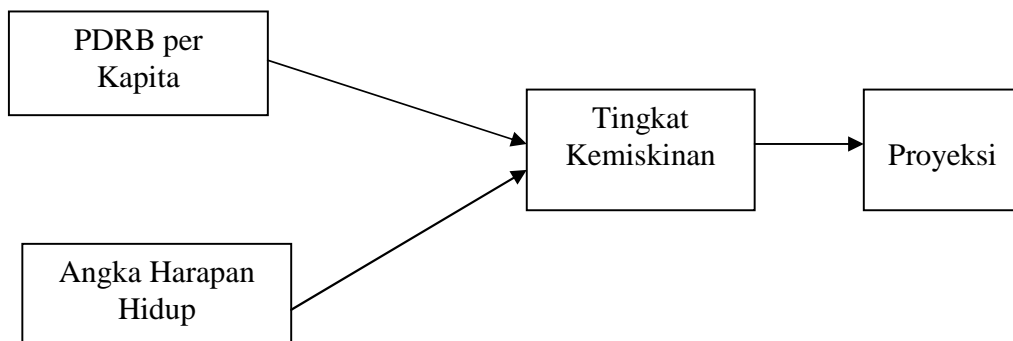
Penelitian	Tujuan Penelitian	Model penelitian	Hasil Empiris
<p>Stephen Kapsos (2004) <i>“Estimating growth requirements for reducing working poverty: Can the world halve working poverty by 2015?”</i></p>	<p>membahas tentang estimasi kemiskinan serta proyeksi besarnya kemiskinan kerja sampai dengan tahun 2015 di dunia tingkat pertumbuhan GDP tahunan</p>	<p>1. Model yang digunakan : $\ln(Y_{it}/1-Y_{it}) = \alpha_i + x_{it}\beta + x_{1it}\beta_1 + e_{it}$</p> <p>$Y_{it}$ = tingkat kemiskinan x_{it} = GDP perkapita negara i tahun t x_{1it} = angka harapan hidup negara i tahun t</p> <p>2. Untuk mencari elastisitas produktivitas tenaga kerja $\log(Productive\ Employment_{it}) = \alpha + \beta_1 \log(GDP_{it}) + \epsilon_{it}$</p> <p>$GDP_{it}$ = GDP negara i tahun t</p>	<p>1. Terdapat hubungan negatif antara GDP perkapita dengan kemiskinan, dan Angka Harapan hidup dengan kemiskinan</p> <p>2. Proyeksi, kemiskinan di dunia semakin meningkat, sehingga tidak sesuai dengan MDGs yaitu mengurangi tingkat kemiskinan</p>
<p>Hermanto Siregar dan Dwi Wahyu Winarti (2008) yang berjudul <i>“Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap</i></p>	<p>mengetahui dan menganalisis pengaruh serta dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin indonesia, hal ini dilakukan karena jumlah penduduk</p>	<p>1. Model yang digunakan : $POVERTY_{ij} = \beta_1 PDRB_{ij} + \beta_2 POPULASI_{ij} + \beta_3 AGRISHARE_{ij} + \beta_4 INDUSTRISHARE_{ij} + \beta_5 INFLASI_{ij} + \beta_6 SMP_{ij} + \beta_7 SMA_{ij} + \beta_8 DIPLM + \beta_9 DUMMYKRISIS_{ij} + \epsilon_{ij}$</p> <p>$POVERTY_{ij}$ = jumlah orang miskin pulau i tahun t $PDRB_{ij}$ = PDRB pulau i tahun t</p>	<p>1. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pertumbuhan berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun pengaruhnya relatif tidak besar</p> <p>2. Inflasi maupun populasi penduduk berpengaruh signifikan terhadap</p>

<p><i>Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”</i></p>	<p>miskin akibat krisis belum berhasil dikurangi bahkan cenderung meningkat</p>	<p>POPULASI_{ij} = jumlah populasi penduduk pulau i tahun t AGRISHARE_{ij} = pangsa sektor pertanian dalam PDRB pulau i tahun t INFLASI_{ij} = inflasi pulau i tahun t SMP_{ij} = Jumlah lulusan sekolah setingkat SMP pulau i tahun t SMA_{ij} = Jumlah lulusan sekolah setingkat SMA pulau i tahun t DIPLM_{ij} = Jumlah lulusan sekolah setingkat DIPLOMA pulau i tahun t DUMMYKRISIS_{ij} = dummy krisis ekonomi pulau i tahun t</p>	<p>kemiskinan, namun pengaruhnya relatif kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pendidikan merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan. 4. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang mampu mengurangi kemiskinan suatu daerah melainkan efek kebawah (tickle down effect). 5. Pertumbuhan ekonomimerupakan syarat keharusan dalam pengurangan kemiskinan, tetapi syarat kecukupannya juga harus dipenuhi, misalnya laju inflasi dan laju populasi yang harus terkendali, industrialisasi pertanian dan pedesaan yang tepat, serta akumulasi modal manusia yang cepat juga harus dipenuhi.
<p>Saeful Hidayat (2007) yang berjudul “<i>Pertumbuhan Ekonomi, Ketidakmerataan Pendapatan dan Kemiskinan:</i></p>	<p>Menganalisis tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan terhadap kemiskinan.</p>	<p>1. Model yang digunakan $\text{Log } G_{kt} \text{ Log } R_{kt} = \alpha_k + \beta + \varepsilon$</p> <p>$G_{kt}$ = indeks Gini ratio untuk area ke- k periode ke-t R_{kt} = pertumbuhan ekonomi untuk area ke k-periode ke t, α_k = common/fixed/random effect area</p>	<p>1. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketidakmerataan pendapatan, baik untuk tingkat provinsi secara keseluruhan maupun untuk daerah perkotaan dan perdesaannya.</p>

<p><i>Estimasi Parameter Elastisitas Kemiskinan Tingkat Provinsi Di Indonesia Tahun 1996- 2005”</i></p>		<p>ke -k β = disturbance term</p>	<p>2. Kenaikan ketidakmerataan pendapatan karena adanya pengaruh dari pertumbuhan ekonomi tidaklah menjadi <i>trade-off</i> bagi pengurangan kemiskinan.</p> <p>3. Pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan, baik untuk tingkat provinsi secara keseluruhan maupun untuk daerah perkotaan dan perdesaannya.</p> <p>4. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi untuk tingkat provinsi secara keseluruhan, daerah perkotaan dan perdesaannya adalah pertumbuhan ekonomi yang pro terhadap kemiskinan (<i>pro-poor growth</i>), yang berarti bahwa penduduk miskinnya mendapatkan porsi keuntungan yang lebih banyak daripada penduduk tidak miskin akibat adanya pertumbuhan ekonomi.</p>
---	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan landasan teori dan kajian empiris terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teori sebagai berikut :



Keterangan :

Objek utama penelitian ini melihat bagaimana proyeksi tingkat kemiskinan. Variabel independen dari penelitian ini adalah PDRB per kapita dan Angka harapan hidup sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat Kemiskinan.

2.4 Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai tafsiran yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang akan diuji kebenarannya (M. Nazir, 1998). Setelah adanya kerangka pemikiran di atas, maka penelitian ini dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
2. Diduga Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

3. Diduga Proyeksi Kemiskinan tahun di tahun 2015 mengalami penurunan tingkat kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam bab ini adalah studi kasus dengan menggunakan data sekunder. Data dapat diperoleh dari instansi-instansi terkait dan metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif serta regresi linier berganda dengan menggunakan data panel, sehingga dapat diketahui variabel penelitian dan definisi operasional dari alat analisis yang digunakan.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (M.Nazir, 1998). Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi variabel yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya menggunakan PDRB per kapita dan angka harapan hidup.

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk provinsi. Data tingkat kemiskinan yang digunakan adalah Distribusi Jumlah Penduduk Miskin yang dimulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Variabel ini memiliki satuan persen.

2. PDRB per kapita

PDRB perkapita adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk masing-masing provinsi (BPS). Data PDRB perkapita yang digunakan adalah PDRB perkapita atas harga konstan tahun 2000 yang dimulai dari tahun 2004 sampai dengan 2008. Variabel ini memiliki satuan jutaan rupiah.

3. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya (BPS, 2010). Data Angka Harapan Hidup yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup yang dimulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Karena ketidak tersediaan data, angka harapan hidup setiap provinsi untuk tahun 2007 sampai 2008 diasumsikan konstan dengan tahun terakhir yaitu tahun 2006. Variabel ini memiliki satuan tahun.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data kuantitatif yang apabila menurut sumbernya termasuk data sekunder. Data kuantitatif yaitu data yang berwujud kumpulan angka-angka sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung. Data sekunder disini menggunakan data runtut waktu (*time series*) atau disebut juga data tahunan dan data antar ruang (*cross section*). Keseluruhan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data distribusi persentase penduduk miskin nasional untuk masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2004 - 2008.
2. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan untuk masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2004 – 2008.
3. Data Angka Harapan Hidup untuk masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2004 – 2006.

Untuk Angka Harapan Hidup menggunakan data tahun 2004 - 2006, karena data untuk tahun 2007 - 2008 tidak tersedia, maka di asumsikan memiliki angka harapan hidup yang konstan pada tahun 2006. Penelitian ini hanya menggunakan data kemiskinan 30 provinsi saja, dikarenakan 3 provinsi lain yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Irian Jaya Barat memiliki ketidaklengkapan data.

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data *time series* dan data *cross section* atau sering disebut dengan data panel. Data panel merupakan sekelompok data individual yang diteliti selama rentang waktu tertentu sehingga data panel memberikan informasi observasi setiap individu dalam sampel. Keuntungan menggunakan panel data yaitu dapat meningkatkan jumlah sampel populasi dan memperbesar *degree of freedom*, serta penggabungan informasi yang berkaitan dengan variabel *cross section* dan *time series*. Keuntungan menggunakan data panel (Gujarati, 2003) yaitu :

- a. Di dalam penggunaan data panel yang meliputi data *cross section* dalam rentang waktu tertentu, rentan dengan adanya heterogenitas. Penggunaan teknik estimasi data panel akan memperhitungkan secara eksplisit heterogenitas tersebut.
- b. Dengan menggunakan kombinasi, data akan memberikan informasi, tingkat kolineraritas yang lebih kecil antar variabel dan lebih efisien.
- c. Penggunaan data panel dapat meminimumkan bias yang dihasilkan jika mengagresikan data individu ke dalam regresi yang lebih luas.
- d. Dalam data panel, variabel akan tetap menggambarkan perubahan lainnya akibat penggunaan data *time series*. Selain itu penggunaan data yang tidak lengkap (*unbalanced data*) tidak akan mengurangi ketajaman estimasi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data-data dari berbagai literatur yang berkaitan baik berupa

catatan-catatan, dokumen, arsip, maupun artikel. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian di mana data yang dibutuhkan adalah data 30 Provinsi di Indonesia, meliputi data persentase penduduk miskin, PDRB per kapita, dan angka harapan hidup pada periode tahun 2004-2008 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah.

3.4 Metode Analisis

Metode *Ordinary Least Squares* pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematika berkebangsaan Jerman (Mulyono, 2000:59). Dalam OLS, terdapat sepuluh asumsi yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan asumsi klasik. Asumsi-asumsi ini meliputi:

1. *Linear Regression Model*, yang berarti model harus linier dalam parameter.
2. Nilai X (variabel bebas) adalah tetap (*nonstochastic*).
3. Nilai rata-rata e_i (*error term*) adalah nol (0).
4. Homoskedastisitas, yaitu varians masing-masing e_i (*error term*) adalah sama (konstan) untuk setiap X .
5. Tidak ada autokorelasi antar e_i (*error term*).
6. Tidak ada *covarians* antara e_i (*error term*) dan X (variabel bebas).
7. Jumlah observasi (n) harus lebih besar dari pada jumlah parameter untuk diestimasi.

8. Variabilitas dalam nilai X (variabel bebas).
9. Model regresi tidak bias atau *error*.
10. Tidak terdapat multikolinearitas yang sempurna.

3.4.1 Model Analisis Regresi Data Panel (*Pooled time series*)

Model ini memfokuskan pada analisis regresi dengan kombinasi data *time series* dan *cross section*, yang populer disebut dengan *pooled time series*. *Pooled time series* merupakan kombinasi antara *time series* yang memiliki observasi temporal biasa pada suatu unit analisis dengan data *cross section* yang memiliki observasi-observasi pada unit analisis pada titik tertentu (Syars dalam Mudrajat Kuncoro, 2001). Ciri khusus pada data *time series* adalah berupa urutan numerik di mana interval antar observasi atas sejumlah variabel bersifat konstan dan tetap sedang data *cross section* adalah suatu unit analisis pada suatu titik tertentu dengan observasi atas sejumlah variabel. Unit analisis dalam hal ini dapat individu, kota, kabupaten, provinsi, negara, bisnis, rumah tangga, atau industri. Jadi bila sejumlah variabel untuk sejumlah *cross section* yang berbeda observasi selama kurun waktu tertentu, maka akan diperoleh data pooling.

Alasan penggunaan data pooling:

1. Penggunaan data pooling meningkatkan jumlah observasi (sampel).
Dengan kata lain, cara ini mengatasi masalah keterbatasan jumlah data runtun waktu.

2. Dengan data pooling akan diperoleh variasi antar unit yang berbeda menurut ruang dan variasi yang muncul menurut waktu.

Dengan demikian, analisis dengan data ini memungkinkan untuk menguraikan, menganalisis, dan menguji hipotesis baik hasil maupun proses bagaimana memperoleh hasil.

3.4.2 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam studi ini diadopsi dari model yang digunakan oleh Stephen Kapsos (2004). Model tersebut menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan adalah fungsi dari PDRB perkapita dan angka harapan hidup, dapat ditulis sebagai berikut :

$$KMSKN_i = f(PDRB_i, AHH_i) \dots \dots \dots (3.1)$$

$$KMSKN_i = \beta_0 + \beta_1 PDRB_i + \beta_2 AHH_i + U_i \dots \dots \dots (3.2)$$

Dimana :

KMSKN = Tingkat Kemiskinan Provinsi

PDRB = PDRB per kapita Provinsi

AHH = Angka Harapan Hidup Provinsi

i = *cross section*

t = *time series*

β_0 = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien

U_i = *Disturbance error*

Untuk proyeksi tingkat kemiskinan, menggunakan Microsoft Excel, yaitu dengan memasukkan formula tren yang sudah tersedia. Model tren kemiskinan adalah sebagai berikut :

$$Y' = a_0 + bX \dots \dots \dots (3.3)$$

Dimana,

Y' = nilai Tren Kemiskinan periode tertentu

a_0 = tren periode dasar

b = pertambahan trend tahunan secara rata-rata

x = jumlah unit tahun yang di hitung dari periode dasar

Langkah pertama dalam memproyeksi yaitu dengan mencari trend masing-masing variabel independen dengan menggunakan formula TREND dalam Microsoft Excel. Jika kedua variabel tersebut telah diketahui trend tahun mendatang, maka secara langsung kita dapat mengetahui trend variabel dependennya, yaitu tingkat kemiskinan. Berikut model tren yang digunakan :

$$KMSKN_{2004-2015} = \alpha_0 + \beta_1 PDRB_{2004-2015} + \beta_2 AHH_{2004-2015} + U_i \dots \dots \dots (3.4)$$

Asumsi Proyeksi yang digunakan adalah :

1. Dalam melihat trend kemiskinan, variabel lain yang mempengaruhi kemiskinan di luar variabel independen dalam model dianggap konstan.
2. Kondisi stabilitas ekonomi sebelum dan sesudah proyeksi dianggap normal.

Estimasi model persamaan 3.2 tergantung pada asumsi yang kita buat mengenai intersep, koefisien kemiringan (*slope*), dan *error term*. Ada beberapa kemungkinan (Gujarati, 2003):

1. Asumsi bahwa intersep dan koefisien *slope* (kemiringan) adalah konstan antar waktu (*time*) dan ruang (*space*) dan error term mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu (ruang).
 2. Koefisien *slope* konstan tetapi *intersep* bervariasi antar individu.
 3. Koefisien *slope* konstan tapi *intersep* bervariasi antar waktu.
 4. Koefisien *slope* konstan tetapi *intersep* bervariasi antar waktu dan individu (wilayah).
 5. Seluruh koefisien (*intersep* dan koefisien *slope*) bervariasi antar individu (wilayah).
- Koefisien *slope* konstan tetapi intersep bervariasi antar individual:

Model Fixed Effect Data Panel

Estimasi model regresi dengan data panel dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan *fixed effect*. Pendekatan *fixed effect* yaitu estimasi tergantung pada asumsi yang digunakan *intersep*, *slope*, *koefisien*, dan *error term*. Kemungkinannya yaitu *slope* koefisien konstan tapi *intersep* bervariasi antar individu. Salah satu cara untuk memasukan setiap unit *cross section* dalam perhitungan ini yaitu dengan membedakan *intersep* untuk tiap Provinsi tapi *slope* koefisien semua Provinsi konstan. Sehingga modelnya menjadi :

$$KMSKN_{it} = \alpha_{0i} + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 AHH_{it} + U_i \dots\dots\dots(3.5)$$

i dalam *intersep* pada persamaan 3.5 tersebut menunjukkan perbedaan *intersep* untuk tiap Provinsi. Model persamaan 3.5 disebut sebagai *fixed effect model* (FEM). Dalam *fixed effect*, *intersep* masing-masing provinsi sama untuk semua waktu (*time invariant*). FEM digunakan karena jumlah *cross section* lebih besar daripada *time series* (Dumairy, 1997).

Dalam persamaan 3.5 dan 3.6 digunakan asumsi yang kedua, yaitu koefisien *slope* konstan tetapi *intersep* bervariasi antar wilayah (*dummy* pada 30 Provinsi Di Indonesia). Ketika menggunakan *dummy* untuk mengestimasi *fixed effect* maka persamaan tersebut disebut sebagai *Least Squared Dummy Variabel* (LSDV).

Penggunaan *Dummy* wilayah dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui pola tingkat kemiskinan pada 30 provinsi di Indonesia, selama lima tahun periode

penelitian, yang diduga berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik pada masing-masing provinsi. Dimana Provinsi DKI Jakarta digunakan sebagai wilayah acuan (*benchmark*) karena DKI Jakarta mempunyai jumlah PDRB perkapita tertinggi. DKI Jakarta merupakan ibu kota negara di mana, segala sesuatunya menjadi acuan provinsi lainnya, sehingga persamaan yang digunakan dalam penelitian ini menjadi :

$$KMSKN_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \dots + \alpha_{30} D_{30i} + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 AHH_{it} + U_i \dots\dots(3.6)$$

Dimana :

D1	= <i>dummy</i> Prov. DKI Jakarta	D17	= <i>dummy</i> Prov. NTB
D2	= <i>dummy</i> Prov. NAD	D18	= <i>dummy</i> Prov. NTT
D3	= <i>dummy</i> Prov. Sumatera Utara	D19	= <i>dummy</i> Prov. Kalbar
D4	= <i>dummy</i> Prov. Sumatera Barat	D20	= <i>dummy</i> Prov. Kalsel
D6	= <i>dummy</i> Prov. Jambi	D22	= <i>dummy</i> Prov. Kaltim
D7	= <i>dummy</i> Prov. Sumatera Selatan	D23	= <i>dummy</i> Prov. Sulut
D8	= <i>dummy</i> Prov. Bengkulu	D24	= <i>dummy</i> Prov. Sulteng
D9	= <i>dummy</i> Prov. Lampung	D25	= <i>dummy</i> Prov. Sulsel
D10	= <i>dummy</i> Prov. Bangka Belitung	D26	= <i>dummy</i> Prov. Sultara
D11	= <i>dummy</i> Prov. Jawa Barat	D27	= <i>dummy</i> Prov. Gorontalo
D12	= <i>dummy</i> Prov. Jawa Tengah	D28	= <i>dummy</i> Prov. Maluku
D13	= <i>dummy</i> Prov. DIY	D29	= <i>dummy</i> Prov. Maluku Utara
D14	= <i>dummy</i> Prov. Jawa Timur	D30	= <i>dummy</i> Prov Papua
D15	= <i>dummy</i> Prov. Banten		
D16	= <i>dummy</i> Prov. Bali		

α_1 = intersep

$\alpha_2 - \alpha_{35}$ = Koefisien *dummy* wilayah

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien variabel

Untuk mengolah model panel di atas, maka digunakan software Eviews 6.0. Penggunaan Eviews 6.0 dikarenakan software tersebut lebih cepat dalam pengolahan data panel serta penyajian hasil regresi yang mudah dimengerti. Sementara untuk pengolahan proyeksi tingkat kemiskinan, menggunakan Microsoft Excel dengan formula tren untuk memproyeksi hingga tahun 2015. Penggunaan Microsoft excel dikarenakan, program ini lebih mudah dipergunakan untuk data yang tidak berbentuk time series sehingga dalam memproyeksi lebih mudah dipahami.

3.4.3. Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Dengan pemakaian metode OLS, untuk menghasilkan nilai parameter model penduga yang lebih tepat, maka diperlukan pendeteksian apakah model tersebut menyimpang dari asumsi klasik atau tidak, deteksi tersebut terdiri dari :

a. Deteksi Normalitas

Regresi linier normal klasik mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari gangguan μ_t memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini penaksir akan memenuhi

sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti *unbiased* dan memiliki varian yang minimum (Gujarati, 2003).

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain *Jarque-Bera Test* (J-B *Test*) dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B *Test*, yang dilakukan dengan menghitung nilai *skewness* dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai χ^2 (*Chi-Square*) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal (Firmansyah, 2000).

b. Deteksi Heteroskedasitas

Salah satu asumsi dalam model regresi linier klasik adalah bahwa varians dari setiap *disturbance term* yang dibatasi oleh nilai tertentu, terbentuk suatu nilai konstan yang sama dengan σ^2 . Deteksi Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah *disturbance term* memiliki varians yang sama atau tidak dalam model persamaan regresi. Deteksi Heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Penelitian ini menggunakan uji Glejser, untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya (Gujarati, 2003). Sebagai pengertian dasar, residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi dan absolut adalah nilai mutlaknya.

c. Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi diasumsikan sebagai unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsure disturbansi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun (Gujarati, 1995).

Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data *time series* walaupun dapat juga terjadi pada data *cross section*. Dalam data *time series*, observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antar dua observasi sangat pendek.

Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. Deteksi ini sesungguhnya dilandasi oleh model eror yang mempunyai korelasi sebagaimana ditunjukkan, yaitu:

$$\mu_t = \rho \mu_{t-1} + v_t \dots\dots\dots(3.7)$$

Dimana :

μ_t : error pada waktu ke-t

μ_{t-1} : error pada waktu ke-(t-1)

ρ : koefisien autokorelasi lag-1 (untuk mengukur korelasi antara residual pada waktu ke-t dengan residual pada waktu (t-1)

v_t : error yang independen dan berdistribusi normal dengan nilai tengah =0, dan varians σ^2 .

Jika $\rho = 0$, maka dapat disimpulkan tidak ada serial korelasi di dalam residual. Oleh karena itu, uji ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0: \rho = 0$$

$$H_1: \rho \neq 0$$

Statistik Durbin-Watson didefinisikan sebagai berikut :

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^n (u_t - u_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{t=n} u_t^2} \dots\dots\dots(3.8)$$

$$\text{Dimana : } \mu_t = Y_t - \beta_0 - \beta_1 X_t = Y_t - Y_t ,$$

residual pada waktu ke-t

$$\mu_{t-1} = Y_{t-1} - \beta_0 - \beta_1 X_{t-1} = Y_{t-1} - Y_{t-1} ,$$

residual pada waktu ke (t-1).

Persamaan (3.7) dapat pula dituliskan sebagai berikut :

$$Dw = \frac{2[1 - \sum u_t \cdot u_{t-1}]}{\sum u_t^2} = 2(1 - \rho) \dots\dots\dots(3.9)$$

Persamaan (3.7) dapat pula dituliskan sebagai berikut :

$$\rho = \frac{\sum (u_t - u_{t-1})^2}{\sum u_t^2} \dots\dots\dots(3.10)$$

Sebagaimana telah disebutkan bahwa ρ adalah koefisien autokorelasi yang mempunyai nilai: $-1 \leq \rho \leq 1$. dengan demikian, berdasarkan persamaan (3.9) akan dapat nilai statistik DW, yaitu : $0 \leq d \leq 1$. persamaan (3.9) juga mengartikan bahwa:

- Jika statistik DW bernilai 2, maka ρ akan bernilai 0, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- Jika statistik DW bernilai 0, maka ρ akan bernilai 1, yang berarti tidak ada autokorelasi positif.
- Jika statistik DW bernilai 4, maka ρ akan bernilai -1, yang berarti tidak ada autokorelasi negatif.

Untuk kepentingan tersebut, DW telah mempunyai tabel yang digunakan sebagai pembanding uji DW yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan dengan tepat ada atau tidaknya autokorelasi. Dalam membandingkan hasil tersendiri. Untuk mempermudah dalam memahami cara melakukan perbandingan tersebut, perhatikan gambar berikut:

Gambar 3.1

Aturan membandingkan Uji Durbin-Watson Dengan Tabel Durbin Watson



Sumber: Gujarati, 2003

Tabel DW terdiri dari dua nilai, yaitu batas bawah (d_L) dan batas atas (d_U).

Nilai-nilai ini dapat digunakan sebagai pembanding uji DW, dengan aturan sebagai berikut:

- Bila $DW < d_L$; berarti ada korelasi yang positif atau kecenderungannya $\rho = 1$.
- Bila $d_L \leq DW \leq d_U$; berarti kita tidak dapat mengambil kesimpulan apapun.
- Bila $d_U < DW < 4-d_U$; berarti tidak ada korelasi positif maupun negatif.
- Bila $4-d_U \leq DW \leq d_L$; berarti kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa.
- Bila $DW > 4-d_L$; berarti ada korelasi negatif.

d. Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas berhubungan dengan situasi di mana ada hubungan linier baik yang pasti atau mendekati pasti di antara variabel independen (Gujarati, 2003). Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinearitas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak dipercaya.

Deteksi multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linier dalam model persamaan regresi yang digunakan. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penaksiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini deteksi multikolinearitas akan dilakukan dengan menggunakan *auxiliary regression* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih besar dari R^2 regresi *auxiliary* maka di dalam model tidak terjadi multikolinearitas.

3.4.4 Pengujian Statistik

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, dilakukanlah uji hipotesis. Jika model sudah bebas dari penyimpangan asumsi klasik, maka pengujian hipotesis dapat dilakukan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun secara bersama-sama dilakukan dengan uji statistik t (t-test) dan uji F (F-test).

3.4.4.1 Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

H_1 : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol (Gujarati, 2003).

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3.4.4.2 Pengujian Koefisien Regresi secara individual (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Uji t menggunakan hipotesis sebagai berikut (Gujarati, 2003) :

Hipotesis 1

Uji t untuk variabel PDRB perkapita

$H_0: \beta_1 = 0$ (tidak ada hubungan linier antara PDRB perkapita dengan tingkat kemiskinan)

$H_1: \beta_1 < 0$ (ada pengaruh negatif PDRB perkapita terhadap tingkat kemiskinan)

Bila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hipotesis 2

Uji t untuk variabel Angka Harapan Hidup

$H_0: \beta_2 = 0$ (tidak ada hubungan linier antara angka harapan hidup dengan kemiskinan)

$H_1: \beta_1 < 0$ (ada pengaruh negatif angka harapan hidup dengan kemiskinan)

Bila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel, yang berarti variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.4.5 Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi

diantara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel independen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi model dependen (Gujarati, 2003).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel dependen, (R^2) pasti meningkat, tidak peduli apakah variable tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti nilai R^2 , nilai *adjusted* R^2 dapat naik dapat turun apabila satu variabel independen ditambahkan dalam model. Pengujian ini pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang menentukan rendahnya pembangunan di suatu wilayah. Hal tersebut dapat dilihat pada perkembangan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya di wilayah tersebut maupun kondisi kesehatan masyarakatnya. Perumbuhan ekonomi setiap wilayah dapat dilihat dari PDRB perkapita wilayah yang bersangkutan, dan perkembangan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari angka harapan hidup.

Dalam awal pada bab ini akan dijelaskan mengenai karakteristik objek penelitian, gambaran umum mengenai variabel penelitian yang meliputi tingkat kemiskinan, PDRB perkapita, angka harapan hidup 30 provinsi di Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008

Selanjutnya dalam bab ini juga akan menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh dari PDRB perkapita, dan angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan, serta akan melihat bagaimana proyeksi tingkat kemiskinan 30 provinsi di Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.

Dalam menjawab pertanyaan penelitian digunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif statistik serta regresi linier berganda dengan model panel data yang diestimasi dengan menggunakan *dummy* wilayah sehingga persamaan yang digunakan adalah *Least Squared Dummy Variable* (LSDV). Model penelitian yang

digunakan dalam studi ini adalah diadopsi dari model penelitian yang digunakan oleh Stephen Kapsos (2004).

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

Indonesia terletak melintang antara 6° 08' Lintang Utara sampai 11° 15' Lintang Selatan dan membujur antara 95° 45' Bujur Timur sampai 141° 05' Bujur. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 buah pulau, dengan luas laut sekitar 7,9 juta km² atau sekitar 81 persen dari luas keseluruhan wilayah Indonesia. Daratan Indonesia yang mempunyai luas sekitar 1,9 juta km² mempunyai puluhan atau bahkan ratusan gunung berapi dan sungai.

4.1.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Oleh karena itu, pemerintah sangat berupaya keras untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut sehingga pembangunan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam menentukan batas ukur untuk mengenali siapa si miskin tersebut.

Tabel 4.1 disajikan data tingkat kemiskinan 30 provinsi di Indonesia dari tahun 2004 – 2008 beserta laju pertumbuhannya.

Tabel 4.1
Tingkat Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan
30 Provinsi Di Indonesia
Tahun 2004 - 2008

No	Nama Provinsi	Tingkat Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan								
		2004 (%)	2005 (%)	Laju pertumbuhan (%)	2006	Laju pertumbuhan (%)	2007 (%)	Laju pertumbuhan (%)	2008 (%)	Laju pertumbuhan (%)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	28,47	28,69	0,77	28,28	-1,42	26,65	-5,76	23,53	-11,70
2.	Sumatera Utara	14,93	14,68	-1,67	15,01	2,24	13,90	-7,39	12,55	-9,71
3.	Sumatera Barat	10,46	10,89	4,11	12,51	14,87	11,90	-4,87	10,67	-10,33
4.	Riau	13,12	12,51	-4,64	11,85	-5,27	11,20	-5,48	10,63	-5,08
5.	Jambi	12,45	11,88	-4,57	11,37	-4,29	10,27	-9,67	9,32	-9,25
6.	Sumatera Selatan	20,92	21,01	0,43	20,99	-0,09	19,15	-8,76	17,73	-7,41
7.	Bengkulu	22,39	22,18	-0,93	23,00	3,69	22,13	-3,78	20,64	-6,73
8.	Lampung	22,22	21,42	-3,60	22,77	6,30	22,19	-2,54	20,98	-5,45
9.	Kep. Bangka Belitung	9,07	9,74	7,38	10,91	12,01	9,54	-12,55	8,58	-10,06
10.	DKI Jakarta	3,18	3,61	13,52	4,57	26,59	4,61	0,87	4,29	-6,94
11.	Jawa Barat	12,10	13,06	7,93	14,49	10,94	13,55	-6,48	13,01	-3,98
12.	Jawa Tengah	21,11	20,49	-2,93	22,19	8,29	20,43	-7,93	19,23	-5,87
13.	D.I.Yogyakarta	19,14	18,95	-1,00	19,15	1,05	18,99	-0,83	18,32	-3,52
14.	Jawa Timur	20,08	19,95	-0,64	21,09	5,71	19,98	-5,26	18,51	-7,35
15.	Banten	8,58	8,86	3,26	9,79	10,50	9,07	-7,35	8,15	-10,14
16.	Bali	6,85	6,72	-1,89	7,08	5,35	6,63	-6,35	6,17	-6,93
17.	Nusa Tenggara Barat	25,38	25,92	2,12	27,17	4,82	24,99	-8,02	23,81	-4,72
18.	Nusa Tenggara Timur	27,86	28,19	1,18	29,34	4,07	27,51	-6,23	25,65	-6,76
19.	Kalimantan Barat	13,91	14,24	2,37	15,24	7,02	12,91	-15,28	11,07	-14,25
20.	Kalimantan Tengah	10,44	10,73	2,77	11,00	2,51	9,38	-14,72	8,71	-7,14
21.	Kalimantan Selatan	7,19	7,23	0,55	8,32	15,07	7,01	-15,74	6,48	-7,56
22.	Kalimantan Timur	11,57	10,57	8,64	11,41	7,94	11,04	-3,24	9,51	-13,85
23.	Sulawesi Utara	8,94	9,34	4,47	11,54	23,55	11,42	-1,03	10,10	-11,55
24.	Sulawesi Tengah	21,69	21,80	0,50	23,63	8,39	22,42	-5,12	20,75	-7,44
25.	Sulawesi Selatan	14,90	14,98	0,53	14,57	-2,73	14,11	-3,15	13,34	-5,45
26.	Sulawesi Tenggara	21,90	21,45	-2,05	23,37	8,95	21,33	-8,72	19,53	-8,43
27.	Gorontalo	29,01	29,05	0,13	29,13	0,27	27,35	-6,11	24,88	-9,03
28.	Maluku	32,13	32,28	0,46	33,03	2,32	31,14	-5,72	29,66	-4,75
29.	Maluku Utara	12,42	13,23	6,52	12,73	-3,77	11,97	-5,97	11,28	-5,76
30.	Papua	38,69	40,83	5,53	41,52	1,66	40,78	-1,78	37,08	-9,29

Sumber : Data Statistik Indonesia, diolah

Berdasarkan tabel 4.1 tanda negatif berarti penurunan tingkat kemiskinan, dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan 30 provinsi di Indonesia pada tahun 2004 sampai tahun 2006 mengalami fluktuasi. Di tahun 2005 ada provinsi yang mengalami kenaikan, adapula yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Tetapi di tahun 2006, peningkatan kemiskinan hampir di semua provinsi, meskipun ada beberapa provinsi yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Peningkatan tingkat kemiskinan di tahun tersebut disebabkan oleh naiknya harga minyak dunia, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tingkat inflasi pun juga ikut meningkat, sehingga harga beraspun ikut naik.

Sementara kondisi kemiskinan dari tahun 2007 sampai tahun 2008, sudah berangsur membaik. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang relatif stabil, menurunnya harga kebutuhan pokok terutama beras, dan meningkatnya rata-rata upah nominal dan upah riil harian buruh tani (BPS, 2009).

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia perlu diketahui sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia sehingga ke depannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini dan tidak hanya sekedar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga.

4.1.3 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun (BPS). PDRB perkapita diperoleh dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita seringkali digunakan sebagai indikator pembangunan. Pendapatan perkapita bisa memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan (Lincolyn Arsyad, 1999). Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Thamrin, 2000). Melalui data PDRB dapat pula diketahui kondisi perekonomian regional suatu daerah.

Tabel 4.2 disajikan data PDRB perkapita atas harga konstan 2000 di 30 provinsi di Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 beserta laju pertumbuhannya.

Tabel 4.2
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
30 Provinsi Di Indonesia (JUTA RUPIAH)
Tahun 2004 – 2008

No	Nama Provinsi	PDRB per kapita								
		2004	2005	Laju Pertum- buhan (%)	2006	Laju Pertum- buhan (%)	2007	Laju Pertum- buhan (%)	2008	Laju Pertum- buhan (%)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	9.873.669	8.886.500	-10,00	8.872.800	-0,15	8.519.100	-3,98	7.938.100	-6,81
2.	Sumatera Utara	6.873.420	7.078.300	2,98	7.392.700	4,44	7.775.400	5,17	8.140.600	4,69
3.	Sumatera Barat	6.080.565	6.384.500	5,00	6.681.000	4,64	7.006.000	4,86	7.349.600	4,90
4.	Riau	16.642.318	16.395.600	-1,48	16.832.400	2,66	17.001.200	1,00	17.552.900	3,24
5.	Jambi	4.553.310	4.761.500	4,57	4.956.500	4,09	5.205.700	5,02	5.486.000	5,38
6.	Sumatera Selatan	7.142.641	7.282.000	1,95	7.547.800	3,65	7.872.100	4,29	8.155.200	3,59
7.	Bengkulu	3.806.128	3.983.800	4,66	4.154.000	4,27	4.335.400	4,36	4.479.000	3,23
8.	Lampung	4.001.031	4.147.800	3,66	4.293.200	3,50	4.485.000	4,46	4.656.200	3,81
9.	Kepulauan Bangka Belitung	8.219.416	8.101.300	-1,43	8.300.000	2,45	8.552.000	3,03	8.805.900	2,96
10.	DKI Jakarta	31.832.209	33.205.200	4,31	34.837.500	4,91	36.733.100	5,44	38654.200	5,22
11.	Jawa Barat	5.956.962	6.203.900	4,14	6.479.700	4,44	6.798.600	4,92	7.091.500	4,30
12.	Jawa Tengah	4.172.657	4.488.100	7,55	4.690.000	4,49	4.913.800	4,77	5.142.800	4,66
13.	D.I.Yogyakarta	5.008.951	5.024.800	0,31	5.157.400	2,63	5.325.800	3,26	5.538.100	3,98
14.	Jawa Timur	6.639.717	7.027.500	5,84	7.329.900	4,30	7.800.800	6,42	8.216.800	5,33
15.	Banten	6.011.802	6.405.700	6,55	6.634.300	3,56	6.902.700	4,04	7.168.100	3,84
16.	Bali	5.876.262	6.187.900	5,30	6.443.800	4,13	6.752.400	4,78	7.082.100	4,88
17.	Nusa Tenggara Barat	3.655.516	3.659.500	0,10	3.696.900	1,02	3.813.400	3,15	3.849.800	0,95
18.	Nusa Tenggara Timur	2.294.852	2.305.700	0,47	2.376.000	3,04	2.450.600	3,13	2.520.000	2,83
19.	Kalimantan Barat	5.574.439	5.803.400	4,10	6.029.600	3,89	6.284.700	4,23	6.515.200	3,66
20.	Kalimantan Tengah	7.084.993	7.125.200	0,56	7.430.600	0,42	7.767.300	4,53	8.129.800	4,66
21.	Kalimantan Selatan	6.870.713	7.065.600	2,83	7.306.600	3,41	7.631.600	4,44	7.990.000	4,60
22.	Kalimantan Timur	32.921.772	32.537.100	-1,16	32.689.200	0,46	32.333.800	-1,08	33.337.000	3,10
23.	Sulawesi Utara	5.628.425	5.994.800	6,50	6.222.000	0,37	6.559.500	5,42	6.987.500	6,52
24.	Sulawesi Tengah	4.850.069	5.083.100	4,80	5.383.000	5,89	5.710.700	6,08	6.057.300	6,06
25.	Sulawesi Selatan	4.452.990	4.862.900	9,20	5.117.500	5,23	5.367.600	4,88	5.707.900	6,33
26.	Sulawesi Tenggara	3.890.489	4.126.500	6,06	4.347.300	5,35	4.593.500	5,66	4.824.400	5,02
27.	Gorontalo	2.108.284	2.165.700	2,72	2.294.400	5,94	2.435.900	6,16	2.592.800	6,44
28.	Maluku	2.493.680	2.576.900	3,33	2.680.500	4,02	2.790.700	4,11	2.867.500	2,75
29.	Maluku Utara	2.438.344	2.447.000	0,35	2.539.500	3,78	2.648.700	4,30	2.762.400	4,29
30.	Papua	8.689.755	11.479.400	32,10	9.318.000	-18,82	9.525.800	2,23	9.197.600	-3,44

Sumber : Statistik Indonesia, diolah

PDRB dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tingkat pertumbuhan PDRB disebut juga tingkat pertumbuhan ekonomi. PDRB perkapita 30 provinsi di Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, rata-rata di tiap provinsinya mengalami tren yang meningkat. Peningkatan di dalam PDRB perkapita disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan balas jasa dari berbagai kegiatan ekonomi.

Laju pertumbuhan PDRB perkapita tertinggi tahun 2008 adalah Sulawesi Utara, laju pertumbuhannya sebesar 6,52 persen. PDRB perkapitanya semakin meningkat dikarenakan naiknya jumlah investasi di Sulut karena banyak kemudahan yang ditawarkan, antara lain jaminan keamanan, kemudahan izin usaha, serta bebas dari pungli. Sebagian besar investasi adalah dari pihak swasta, terutama perhotelan, perikanan, pertanian, perkebunan, jaringan telekomunikasi, dan pusat perbelanjaan. Sehingga penerimaan daerahnya juga bertambah. Selain itu Sulut salah satu provinsi di Indonesia yang mampu mengatasi krisis ekonomi dengan baik. Yang terlihat dari APBD yang terus naik.

Sedangkan provinsi yang memiliki laju pertumbuhan terendah adalah Papua sebesar -3,44 persen. Rendahnya laju pertumbuhan pada provinsi ini karena tingginya angka kemiskinan, sehingga penerimaan daerah yang diterima juga ikut rendah. PDRB per kapita di tahun 2008 mengalami penurunan. Tetapi penurunan laju pertumbuhan ini tidak lebih besar daripada penurunan di tahun 2005 ke tahun 2006.

4.1.4 Perkembangan Angka Harapan Hidup

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Indonesia sering dipakai sebagai salah satu indikator kesehatan masyarakat suatu daerah. Dengan asumsi semakin panjang angka harapan hidup seseorang di suatu daerah maka menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut.

Berikut disajikan Angka Harapan Hidup di 30 provinsi di Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

Tabel 4.3
Angka Harapan Hidup dan Laju Pertumbuhan
Menurut Provinsi Di Indonesia
Tahun 2004 – 2006

No	Provinsi	Angka Harapan Hidup				
		2004	2005	laju pertumbuhan (%)	2006	laju pertumbuhan (%)
1.	NAD	67,9	68,0	0,14	68,3	0,44
2.	Sumatera Utara	68,2	68,7	0,73	68,9	0,29
3.	Sumatera Barat	67,6	68,2	0,88	68,5	0,43
4.	Riau	69,8	70,7	1,28	70,8	0,14
5.	Jambi	67,6	68,1	0,73	68,5	0,58
6.	Sumatera Selatan	67,7	68,3	0,88	68,8	0,73
7.	Bengkulu	67,4	68,8	2,07	68,9	0,14
8.	Lampung	67,6	68,0	0,59	68,5	0,73
9.	Bangka Belitung	67,2	68,1	1,33	68,3	0,29
10.	DKI Jakarta	72,4	72,5	0,13	72,6	0,13
11.	Jawa Barat	66,7	67,2	0,74	67,4	0,29
12.	Jawa Tengah	69,7	70,6	1,29	70,8	0,27
13.	DI Yogyakarta	72,6	72,9	0,41	73,0	0,13
14.	Jawa Timur	67,2	68,5	1,93	68,6	0,14
15.	Banten	63,3	64,0	1,10	64,3	0,46
16.	Bali	70,2	70,4	0,28	70,5	0,14
17.	Nusa Tenggara Barat	59,4	60,5	1,85	60,9	0,66
18.	Nusa Tenggara Timur	64,4	64,9	0,77	66,5	2,46
19.	Kalimantan Barat	64,8	65,2	0,61	66,0	1,22
20.	Kalimantan Tengah	69,8	70,7	1,28	70,8	0,14
21.	Kalimantan Selatan	61,6	62,1	0,81	62,4	0,48
22.	Kalimantan Timur	69,7	70,3	0,86	70,4	0,14
23.	Sulawesi Utara	71,0	71,7	0,98	71,8	0,13
24.	Sulawesi Tengah	64,6	65,4	1,23	65,6	0,30
25.	Sulawesi Selatan	68,7	68,7	0	69,2	0,72
26.	Sulawesi Tenggara	66,0	66,8	1,21	67,0	0,29
27.	Gorontalo	64,5	65,0	0,77	65,6	0,92
28.	Maluku	66,2	66,2	0	66,6	0,60
29.	Maluku Utara	63,3	64,2	1,42	64,8	0,93
30.	Papua	65,8	67,3	2,27	67,6	0,44

Sumber : BPS Jawa Tengah, diolah

Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa untuk tahun 2004, rata-rata angka harapan hidup selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 mengalami peningkatan. Hal ini

disebabkan oleh tingkat kesehatan masyarakat yang meningkat, pemerintah diduga telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya terutama di bidang kesehatan.

Laju pertumbuhan angka harapan hidup tertinggi terjadi pada provinsi Papua di tahun 2005 sebesar 2,27 persen. Laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2006 adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 2,43 persen. Peningkatan Angka Harapan Hidup di setiap tahunnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kesejahteraan yang semakin meningkat, maka tingkat kemiskinan diharapkan dapat berkurang. Dalam penelitian ini, Angka Harapan Hidup untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 diasumsikan konstan dengan tahun 2006. Hal ini disebabkan karena ketidak tersediaan data di periode tersebut, sehingga diasumsikan sama dengan tahun terakhir.

4.2 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode LSDV. Jenis data yang diolah adalah data *time series* 2004 sampai 2008 dan data *cross section* meliputi 30 provinsi di Indonesia sehingga dapat diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Dalam studi ini mengadopsi persamaan yang digunakan oleh Steven Kapsos tahun 2004. Hasil dari analisis regresi tersebut dapat dilihat dari tabel 4.4

Tabel 4.4
Hasil Regresi Utama
Dependen Variabel: Kemiskinan

Variabel	Persamaan	
	Koefisien	t-signifikan
PDRB perkapita	-0.00000388	-7.72484
Angka Harapan Hidup	-1.41036	-6.65079
D2	6.622202	6.514089
D3	-6.03419	-5.6667
D4	-9.87935	-9.14106
D5	-2.09527	-2.58362
D6	-10.5316	-9.20505
D7	-0.70258	-0.66673
D8	0.446962	0.442031
D9	-0.48697	-0.48164
D10	-11.0679	-10.7586
D11	-9.3322	-8.51055
D12	2.167089	1.656968
D13	3.413262	2.226512
D14	-0.64778	-0.61017
D15	-18.2881	-13.4086
D16	-11.478	-9.51441
D17	-7.80133	-4.10158
D18	1.322861	1.044745
D19	-11.6012	-9.656
D20	-7.57184	-6.46594
D21	-22.3335	-13.4458
D22	2.685197	3.831673
D23	-6.14031	-4.52473
D24	-3.92104	-3.12925
D25	-6.37744	-5.49504
D26	-2.68983	-2.29563
D27	0.774605	0.596135
D28	6.281123	5.118353
D29	-15.6165	-11.3891
D30	17.72334	17.21009
C	120.0516	8.421162
Jumlah Observasi	150	
R-squared	0,989792	
F-statistic	369.0816	

Sumber : Output Pengolahan Data dengan Eviews 6.0 (Lampiran A, halaman 94)

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Deteksi Normalitas

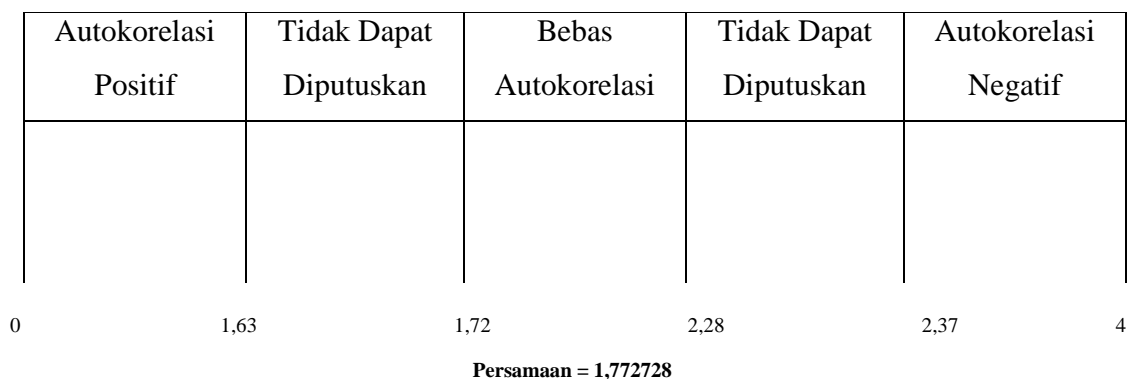
Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung skewness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai χ^2 (Chi Square) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal.

Hasil deteksi normalitas dengan melihat nilai Jarque-Bera dengan χ^2 tabel. Pada persamaan diperoleh hasil J-B hitung ($54,04375 < \chi^2 < 79,08191$). Hasil deteksi normalitas dapat dilihat pada Lampiran B halaman 95 .

Deteksi Autokorelasi

Salah satu uji formal untuk mendeteksi autokorelasi adalah Durbin-Watson. Deteksi ini sesungguhnya dilandasi oleh model error yang mempunyai korelasi sebagaimana telah ditunjukkan dibawah ini:

Gambar 4.2
Uji Durbin-Watson



Diketahui bahwa :

Nilai Obs (n) persamaan	: 150
k-1	: $3 - 1 = 2$
dL	: 1,63
du	: 1,72
dw(persamaan)	: 1,772728

Berdasarkan pengujian *Durbin Watson* diketahui bahwa persamaan tersebut bebas dari autokorelasi.

Deteksi Heteroskedasitas

Deteksi heteroskedasitas dilakukan untuk mengetahui apakah semua *disturbance term* memiliki varians yang sama atau tidak. (Gujarati, 2003). Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya (Gujarati, 2003). Sebagai pengertian dasar, residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi dan absolut adalah nilai mutlaknya. Hasil uji Glejser dapat dilihat pada Lampiran B halaman 96.

Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi dimana terdapat korelasi antar variabel independen. Dalam hal ini disebut dengan variabel yang tidak orthogonal. Variabel yang orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesamanya sama dengan nol. Salah satu cara yang digunakan untuk menguji fenomena

multikolinieritas adalah dengan membandingkan nilai R^2 regresi parsial (*auxiliary regression*) dengan R^2 regresi utama, maka terjadi multikolinieritas.

Dari hasil estimasi terlihat nilai R^2 regresi utama lebih besar dari nilai R^2 hasil *auxiliary regression*, dimana pada persamaan tersebut terdapat di semua variabel. Karena nilai R^2 regresi utama lebih besar dari nilai R^2 hasil *auxiliary regression* yang berarti pada persamaan tersebut tidak ditemukan adanya multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada lampiran B halaman 97.

4.2.2 Pengujian Statistik

4.2.2.1 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen (secara bersama-sama) terhadap variabel dependen, secara statistik. Dalam persamaan pertama dan kedua digunakan taraf keyakinan 95 persen ($\alpha = 5\%$), yaitu $df = 58$ dan F tabel = 1,74. Diketahui bahwa nilai *F-statistic* pada persamaan diketahui bahwa nilai *F-statistic* 369.0816 (lihat pada Lampiran A, halaman 94) dan nilai probabilitas *F-statistic* persamaan tersebut adalah 0,000000. Dapat disimpulkan bahwa F hitung $>$ F tabel maka dapat disimpulkan dalam persamaan tersebut variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan (H_0 ditolak dan H_1 diterima).

2. Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual (uji t)

Pengujian koefisien regresi secara individual (uji t) dilihat dari signifikansi nilai t-hitung. Uji t bertujuan melihat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Parameter suatu variabel dikatakan mempunyai pengaruh signifikan jika nilai t-hitung suatu variabel lebih besar dari nilai t-tabel.

Dalam persamaan , digunakan taraf keyakinan 95% ($\alpha=5\%$), dengan $df = (n-k = 150-32) = 118$, maka diperoleh t tabel persamaan sebesar 1,65. Dari hasil uji pada persamaan, dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Nilai t-statistic

Variabel	Persamaan II	
	t-signifikan	Prob
PDRB perkapita	-7.72484	0.0000
Angka Harapan Hidup	-6.65079	0.0000
D2	6.514089	0.0000
D3	-5.6667	0.0000
D4	-9.14106	0.0000
D5	-2.58362	0.0000
D6	-9.20505	0.0110
D7	-0.66673	0.0000
D8	0.442031	0.5062
D9	-0.48164	0.6593
D10	-10.7586	0.6310
D11	-8.51055	0.0000
D12	1.656968	0.0000
D13	2.226512	0.1002
D14	-0.61017	0.0279
D15	-13.4086	0.5429
D16	-9.51441	0.0000
D17	-4.10158	0.0000
D18	1.044745	0.0001
D19	-9.656	0.2983
D20	-6.46594	0.0000
D21	-13.4458	0.0000
D22	3.831673	0.0000
D23	-4.52473	0.0002
D24	-3.12925	0.0000
D25	-5.49504	0.0022
D26	-2.29563	0.0000
D27	0.596135	0.0235
D28	5.118353	0.5522
D29	-11.3891	0.0000
D30	17.21009	0.0000

Sumber: Output Pengolahan Data dengan Program Eviews 6.0 (Lampiran A, 94)

Variabel Dependen: pengeluaran perkapita

Berdasarkan hasil estimasi, dapat disimpulkan bahwa pada persamaan yang mempengaruhi secara signifikan, pada persamaan yang mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen adalah PDRB Perkapita, Angka Harapan

Hidup, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D11, D12, D14, D15, D17, D18, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D29, D30. Sedangkan yang tidak signifikan adalah D8, D9, D10, D28.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen secara statistik. Dari hasil regresi utama pada tabel 4.4, didapatkan hasil Koefisien determinasi (R^2) dari hasil estimasi persamaan adalah sebesar 0,989792 yaitu berarti perubahan pada variabel-variabel independent secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 98,97 persen, sedangkan 1,03 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

4.3 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil regresi pada persamaan, koefisien PDRB perkapita sebesar -0,000000388 yang berarti bahwa kenaikan 1 juta rupiah pada PDRB perkapita maka akan menurunkan Tingkat kemiskinan sebesar 0,388 persen. Pada persamaan tersebut PDRB perkapita hubungannya negatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Steven Kapsos (2004) yang menunjukkan PDRB perkapita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat peningkatan PDRB perkapita di setiap daerah. PDRB perkapita suatu daerah dapat dijadikan suatu parameter atau ukuran tingkat rata-rata pendapatan atau kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Apabila PDRB perkapita suatu daerah mengalami kenaikan, maka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini akan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayahnya. Karena pertumbuhan ekonomi adalah syarat keharusan dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti.

4.3.2. Pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil regresi pada persamaan menunjukkan slope koefisien Angka Harapan Hidup menunjukkan angka -1.410357 yang berarti bahwa kenaikan 1 tahun pada Angka Harapan Hidup, maka akan menurunkan Tingkat kemiskinan 1,41 persen.

Pada persamaan ini, Angka Harapan Hidup memiliki hubungan yang negatif dengan Tingkat kemiskinan. Semakin tingginya Angka Harapan Hidup suatu daerah maka menunjukkan peningkatan kesehatan daerahnya. Dengan penduduk yang sehat, akan menambah modal sumber daya manusia di wilayah itu. Peningkatan sumber daya manusia tersebut, akan meningkatkan produktivitas penduduk sehingga dari segi ekonomi pendapatannya bertambah. Peningkatan pendapatan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan pertumbuhan

ekonomi yang tinggi maka kemiskinan di suatu wilayah dapat berkurang. Hal ini sejalan dengan lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*).

4.3.3. Dummy

Dalam menginterpretasikan hasil regresi data panel metode LSDV menggunakan variabel *dummy*, apabila variabel dummy signifikan secara statistik ini menunjukkan bahwa pola tingkat kemiskinan pada Provinsi di Indonesia tersebut berbeda dengan pola tingkat kemiskinan pada Provinsi yang dijadikan *benchmark* (yaitu Provinsi DKI Jakarta). Sementara angka negatif pada koefisien *dummy* menunjukkan bahwa variabel *dummy* tersebut memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan *benchmark* (Provinsi DKI Jakarta).

Dari hasil regresi persamaan diketahui bahwa tidak semua *dummy* wilayah menunjukkan signifikan secara statistik (Lampiran A, halaman 94) Hal ini mengindikasikan bahwa pola tingkat kemiskinan pada Provinsi di Indonesia sama dengan daerah *benchmark* (Provinsi DKI Jakarta). Sedangkan *dummy* wilayah yang berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa pola tingkat kemiskinan provinsi tersebut berbeda dengan daerah *benchmarknya* (Provinsi DKI Jakarta) dan koefisien *dummy* pada persamaan tersebut bernilai negatif, yang berarti tingkat kemiskinan provinsi lain lebih rendah dari daerah *benchmark* (Provinsi DKI Jakarta).

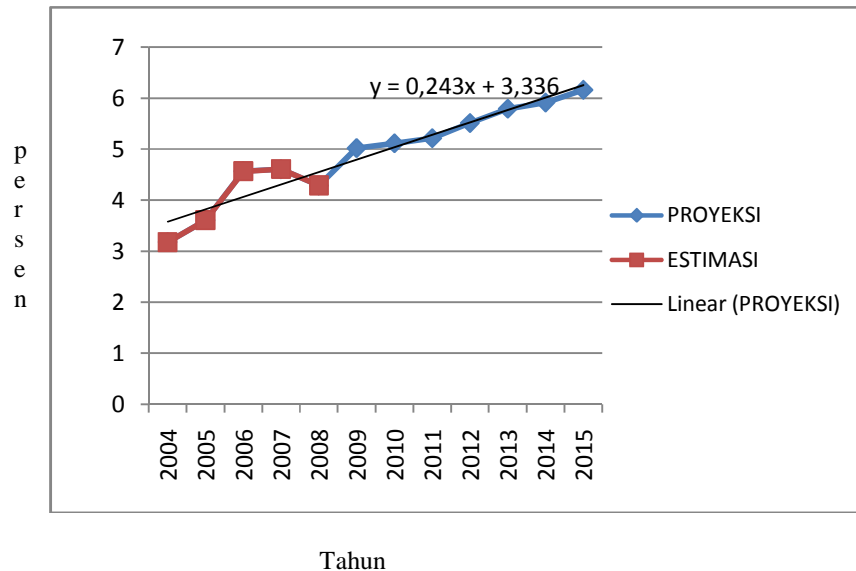
4.3.4 Proyeksi Tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan suatu daerah mengalami perubahan di setiap tahunnya. Ada daerah yang mengalami peningkatan dan ada daerah yang mengalami penurunan. Proyeksi tren kemiskinan berdasarkan dari hasil estimasi persamaan yaitu data tingkat kemiskinan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 menggunakan Microsoft Excel, dapat disimpulkan, diduga pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, 27 provinsi mengalami penurunan tingkat kemiskinan dan 3 provinsi mengalami peningkatan kemiskinan. Ketiga provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara.

DKI Jakarta

Proyeksi tren kemiskinan tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Grafik 4.1
Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2004-2015



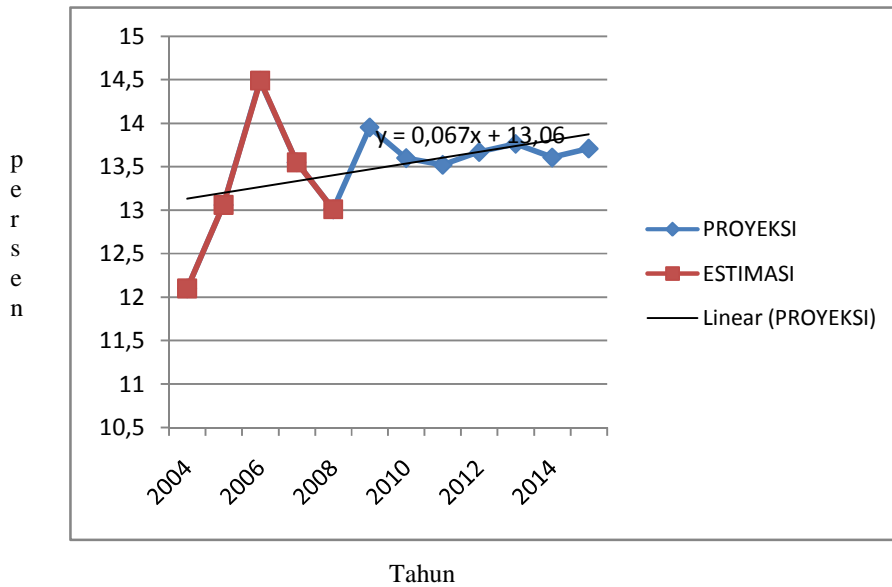
Terjadi peningkatan kemiskinan di Jakarta tahun 2005. Kenaikan harga BBM pada tahun 2005 sebanyak 2 kali telah memicu peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan khususnya di DKI Jakarta. Imbas kenaikan BBM terhadap peningkatan angka kemiskinan mencapai puncaknya pada tahun 2006. Sejak tahun 2007, angka kemiskinan di DKI Jakarta berangsur turun hingga tahun 2008. Sementara hasil dari proyeksinya berbanding terbalik, tren kemiskinan DKI Jakarta di proyeksikan mengalami kenaikan di tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Seperti proyeksi sebelumnya, diduga kenaikan tingkat kemiskinan di Jakarta disebabkan karena angka urbanisasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Badan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memperkirakan besarnya tingka

turbanisasi di empat kota hingga tahun 2025 mencapai 80 persen. Termasuk di dalamnya DKI Jakarta.

Jawa Barat

Berdasarkan hasil estimasi tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2004 sampai tahun 2008, Jawa Barat mengalami peningkatan kemiskinan di tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Dalam artikel di Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung pada akhir tahun 2005 menjelaskan bahwa indikator akses terhadap prasarana dasar menunjukkan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Bekasi sangat buruk dalam penyediaan air bersih. Sekitar 80 % penduduk Kabupaten Tasikmalaya dan 74,9 % penduduk Kota Bekasi kesulitan untuk mengakses air bersih. Sementara 55,9 % penduduk Kabupaten Cianjur dan 34,6 % penduduk Kabupaten Sukabumi kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan.

Grafik 4.2
Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2004-2015



Pada periode tahun 2007 sampai tahun 2008 tingkat kemiskinan cenderung menurun. Pemerintah daerah Jawa Barat sudah dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan dalam menekan angka kemiskinan, dengan menyediakan air bersih di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Selain itu peningkatan kesehatan masyarakatnya telah dilakukan dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang baik.

Dalam proyeksinya, di tahun 2009-2015 kemiskinan di Jawa Barat kembali mengalami peningkatan. Diduga hal ini disebabkan karena kurang kuatnya kinerja desa dan kelurahan dalam bidang perekonomian. Kinerja ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditunda untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di provinsi Jawa Barat. Selain itu, dengan meningkatkan kinerja aparat desa dan kelurahan dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintah Daerah

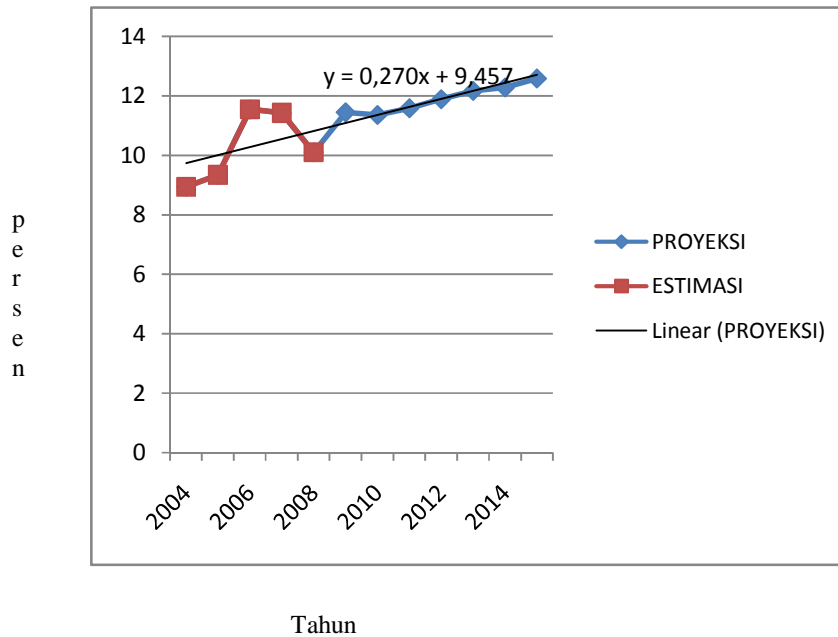
dalam mendukung pelayanan prima kepada masyarakat, dan tujuannya sendiri untuk meningkatkan produktivitas, akuntabilitas dan sinergitas pemerintahan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan.

Periode tahun 2010 sampai tahun 2015 diproyeksikan kemiskinan relatif stabil kenaikan serta penurunan kemiskinannya. Pemerintah daerah Jawa Barat diduga telah mampu menjalankan program-program pengentasan kemiskinan dengan baik, meskipun mengalami tren kemiskinan yang meningkat, tetapi setidaknya lebih rendah angka kemiskinannya dari tahun 2006 yang mencapai 14,49 persen.

Sulawesi Utara

Peningkatan perekonomian di Sulut bisa diakui mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Namun sangat disayangkan, sejalan dengan itu tingkat kemiskinan masih tinggi. Dapat dilihat dalam estimasi kemiskinan berikut ini :

Grafik 4.3
Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2004-2015



Kenaikan angka kemiskinan Sulawesi Utara di tahun 2006, diakibatkan karena tingginya tingkat inflasi karena kenaikan harga BBM. Namun, berangsur-angsur membaik, kondisi ini terus membaik hingga tahun 2008. Pemerintah daerah Sulawesi Utara telah dapat menekan angka kemiskinan di daerahnya. Penurunan angka kemiskinan tersebut, seiring pemerintah daerah Sulawesi Utara yang mulai membuka akses informasi dan membangun berbagai infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Dengan terbukanya akses informasi dan transportasi di setiap wilayah yang memiliki potensi Sumber daya alam, tingkat kesejahteraan masyarakat terus berkembang.

Berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan, tingkat kemiskinan daerah ini tidak bertahan lama. Tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 di proyeksikan tren kemiskinannya meningkat perlahan hingga kisaran 12 persenan. Di duga hal ini di sebabkan karena pemerintah daerah Sulawesi Utara hendaknya tidak sebatas memberikan perhatian pada pembangunan fisik, melainkan dapat memfasilitasi atau menaikkan harga jual setiap komoditi para petani dan nelayan.

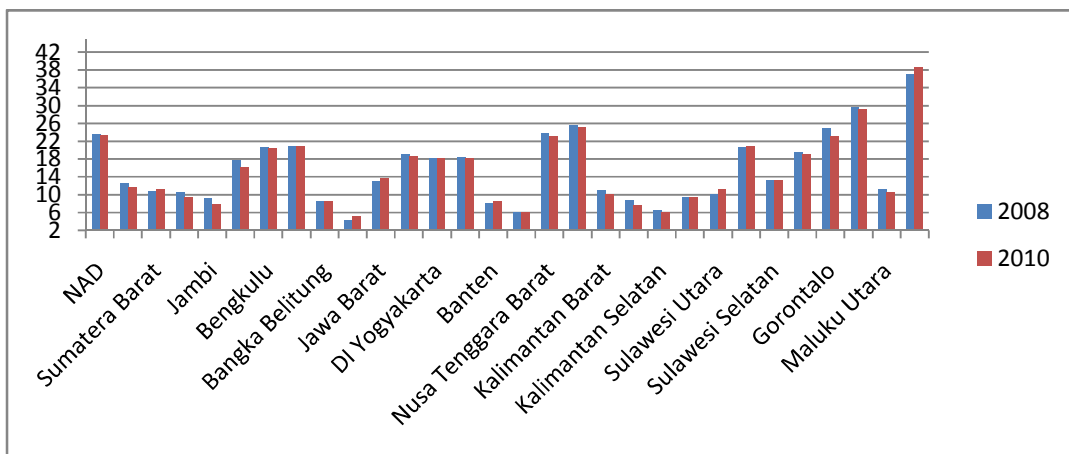
Berdasarkan proyeksi persamaan dapat diambil kesimpulan, bahwa 27 provinsi di Indonesia tahun 2009 sampai tahun 2015 mengalami penurunan kemiskinan. Hal ini terjadi diduga karena pemerintah telah dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan baik, seperti program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang penyelenggaraannya mulai bisa dirasakan hasilnya oleh penduduk miskin. Selain itu, seperti di beberapa daerah Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan daerah lainnya, diduga pemerintah daerah telah mampu menangani masalah penyediaan air bersih maupun pelayanan kesehatan yang baik di setiap daerahnya, baik tingkat kabupaten ataupun kota di daerahnya. Dengan penyediaan air bersih, daerah yang sebagian penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani dapat mengairi pertaniannya dengan baik, tanpa harus khawatir kekurangan pasokan air bersih. Sementara untuk daerah yang rawan sekali akan penyakit, masyarakat pun tidak harus khawatir dengan pengobatan maupun pencegahan akan penyakit tersebut. Program pemerintah lain yaitu pendidikan, seperti wajar 9 tahun sampai tingkat SMP dapat menekan angka kemiskinan anak. Dengan program baru yaitu wajar 12 tahun sampai tingkat SMA, diharapkan kedepannya dapat lebih menekan angka kemiskinan anak.

Pada persamaan ini diproyeksikan bahwa 27 provinsi di Indonesia mengalami penurunan kemiskinan, hal ini diduga karena tren estimasi kemiskinan tahun 2004 sampai tahun 2008 mengalami penurunan, meskipun di tahun 2006 mengalami peningkatan, tetapi di tahun selanjutnya mengalami penurunan kemiskinan. Sehingga, diproyeksikan tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan juga. Penurunan tren kemiskinan yang di proyeksikan disebabkan karena pemerintah telah dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin, serta bidang-bidang lainnya. Pemerintah terus melakukan kebijakan dan program pengendalian harga bahan pokok di tingkat konsumen melalui operasi pasar apabila terjadi gejolak harga. Program ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok khususnya beras. Selain itu salah satu program pemerintah yang mendukung turunnya angka kemiskinan adalah Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM). Berdasarkan Tim pengendali program Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, PNPM Mandiri sejak diluncurkan tahun 2007 lalu telah berhasil memberikan lapangan kerja pada pengangguran terdidik sebanyak 3.188 orang sebagai konsultan, 18 ribu orang sebagai fasilitator, serta memberika lapangan kerja melalui program padat karya kepada 62 juta orang penganggur di pedesaan. Program itu berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga pengentasan kemiskinan sebagai target program tersebut secara signifikan mengena. Menurut Wahnarno selaku ketua Tim pengendali program Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, karena program pembangunan padat karya yang melibatkan partisipai masyarakat, maka

program PNPM ini juga mampu menghemat biaya pembangunan di masyarakat sebesar 35 persen. (BPS, 2009). Hal ini sangat mendukung untuk penurunan tren kemiskinan di tahun mendatang.

Perbandingan tingkat kemiskinan 2008 dengan Proyeksi Tingkat Kemiskinan tahun 2010. Berikut data hasil estimasi tingkat kemiskinan tahun 2008 dan proyeksi kemiskinan tahun 2010.

Grafik 4.4
Perbandingan tingkat kemiskinan 2008 dengan Proyeksi Tingkat Kemiskinan tahun 2010



Grafik 4.8 dapat disimpulkan bahwa proyeksi tingkat kemiskinan di tahun 2010, mengalami penurunan tingkat kemiskinan, kecuali provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Papua, Sulawesi Tengah.

Berdasarkan APBN 2008, perkembangan positif pada sisi ketenagakerjaan di awal 2008 diiringi dengan perbaikan angka kemiskinan. Berdasarkan data Susenas Maret 2008, jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,2 juta orang, dari 37,2 juta orang (16,58 persen) pada Maret 2007 menjadi 34,96 juta

orang (15,42 persen) pada Maret 2008. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2007 – Maret 2008 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang telah menyebabkan kenaikan pengeluaran riil kelompok berpendapatan 40 persen terbawah.

Peningkatan ini konsisten pula dengan peningkatan upah riil buruh tani sebesar 1,8 persen dalam periode Maret 2007 - Maret 2008. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi tambahan kesempatan kerja dalam periode yang sama sebesar 2,15 juta yang pada gilirannya menurunkan tingkat pengangguran. Kedua, terciptanya stabilitas harga laju inflasi (Maret 2008 terhadap Maret 2007) sebesar 8,17 persen. Ketiga, harga rata-rata beras nasional yang merupakan komoditi terpenting bagi penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 3,01 persen.

Mengacu pada RKP 2008, sasaran angka kemiskinan berada pada kisaran 14,8 – 16,0 persen dalam tahun 2008, capaian tingkat kemiskinan sebesar 15,4 persen telah tercapai. Tetapi Pemerintah berupaya agar jumlah angka kemiskinan dapat diperkecil lagi. Oleh karena itu Pemerintah akan terus melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya seperti Askeskin, BOS, raskin, PNPM, dan BLT. Beberapa program kemiskinan yang utama seperti PNPM ditingkatkan bukan hanya jumlah kecamatan dari 2.992 menjadi 4.200 kecamatan tetapi juga kuota anggaran per kecamatan dari Rp 750 juta - Rp 1,5 miliar menjadi Rp 1,5 miliar - Rp 2.5 miliar. Langkah lain dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan adalah dengan melakukan integrasi program kemiskinan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga ke dalam PNPM. Dengan

demikian di samping program inti (PNPM Inti), PNPM juga didukung oleh sejumlah program yang disebut sebagai PNPM Penguatan. Selain program-program di atas, mulai tahun 2008 Pemerintah akan melaksanakan upaya-upaya lain seperti Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lainnya.

Berdasarkan hasil proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2010, mengindikasikan bahwa dalam proyeksi tahun 2009 Pemerintah tetap melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Program ini dikelompokkan menjadi tiga kluster yaitu:

- (1) kluster yang berisi program-program yang memberikan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin kepada kebutuhan dasar,
- (2) kluster yang berisi program-program pemberdayaan bagi masyarakat miskin,
- (3) program-program perkuatan usaha mikro dan kecil.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 diperkirakan didukung oleh sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja, antara lain sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor lainnya. Pada semester pertama 2009, keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada umumnya masih normal. Krisis ekonomi global yang terjadi pada awal tahun 2009 tidak banyak pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia. Hal ini juga tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas ekonomi menjelang pemilu legislatif yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penyerapan

tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2009 meningkat cukup signifikan, dari 102,05 juta pada Februari 2008 dan 102,55 juta orang pada Agustus 2008 menjadi 104,49 juta pada Februari 2009. Sejalan dengan peningkatan lapangan kerja ini, tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 8,46 persen dan 8,39 persen pada Februari dan Agustus 2008 menjadi 8,14 persen pada Februari 2009. Dengan semakin membaiknya perekonomian dan semakin kondusifkan kinerja ekonomi domestik, kondisi ketenagakerjaan yang semakin membaik ini diharapkan akan tetap berlangsung sampai semester kedua tahun 2009 sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan lebih rendah lagi.

Di samping masalah ketenagakerjaan, pada tahun 2009 upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin masih menjadi agenda utama pembangunan, terutama dengan terjadinya krisis finansial global yang berdampak pada sektor riil. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multisektoral, oleh karena itu penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin perlu dilaksanakan melalui berbagai program-program pemerintah yang efektif dan efisien.

Proyeksi berdasarkan RAPBN 2010, dapat menjelaskan, bahwa proyeksi dalam penelitian ini sejalan dengan proyeksi yang dilakukan pemerintah, bahwa dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkatkan ketenagakerjaan yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Dengan meningkatnya kesejahteraan mereka, maka akan menekan angka kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan pada PDRB perkapita akan menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan PDRB perkapita yang semakin meningkat, maka pemerintah dapat lebih meningkatkan program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada. Sehingga kesejahteraan masyarakat miskin dapat meningkat. Dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin, maka akan menekan angka kemiskinan.
2. Variabel Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan pada angka harapan hidup akan menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan Angka Harapan

Hidup yang terus meningkat maka kualitas kesehatan masyarakat, akan meningkat. Hal ini akan menekan angka kemiskinan, karena dengan kualitas kesehatan yang tinggi, maka akan meningkatkan produktivitas masyarakat.

3. Dari hasil proyeksi tren kemiskinan, dapat disimpulkan bahwa proyeksi kemiskinan tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 akan mengalami penurunan tren kemiskinan.
4. Berdasarkan hasil proyeksi, provinsi yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan adalah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Sedangkan pada 27 provinsi lain diproyeksikan mengalami peningkatan kemiskinan.

5.2 Keterbatasan

Proyeksi kemiskinan ini hanya menganalisis 30 provinsi saja, maka diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memproyeksi seluruh provinsi yang ada di Indonesia, sehingga hasil proyeksinya lebih menyeluruh.

5.3 Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan PDRB perkapita guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Pemerintah perlu meningkatkan Angka Harapan Hidup agar kualitas kesehatan penduduk terus meningkat. Hal ini akan menunjang produktivitas

penduduk, sehingga pendapatan yang diperoleh lebih maksimal dan kemiskinan akan berkurang.

3. Proyeksi ini menggunakan data tahun 2004 – 2008, diharapkan pada penelitian ke depan dapat menggunakan data dari tahun yang lebih baru.

DAFTAR PUSTAKA

- APBN 2008. "Nota Keuangan dan APBN 2008" *www.google.com diakses 23 Agustus 2010.*
- Atmawikarta, Arum. 2004. "Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi", *www.google.com 11 Agustus 2010.*
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat.* Yogyakarta : BP STIE YKPN
- Badan Pusat Statistik, 2005, *Data Produk Domestik Regional Bruto Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2007, *Data Produk Domestik Regional Bruto Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2009, *Data Produk Domestik Regional Bruto Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2010, *Proyeksi BPS*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2006, *Data Statistik Indonesia*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2007, *Data Statistik Indonesia*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2009, *Data Statistik Indonesia*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2009, *Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2007, *Data Indeks Pembangunan Manusia*, Jakarta.
- Bappenas. "Program Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Sasaran"
http://old.bappenas.go.id/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=169. *www.bappenas.go.id*, diakses 28 September 2010.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Firmansyah, 2006, *Aplikasi Econometric Views (Eviews) V. 3.0-4.1*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I . 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonometrika Dasar. Terjemahan*. Jakarta: Erlangga.
- Hatta, Liswarti. “*Aplikasi dan Prospek Program Inpres Desa Tertinggal*, <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=77264>, www.digilib.ui.ac.id, diakses 28 September 2010.
- Hidayat, Saeful dan Patunru, Arianto A. 2007. “*Pertumbuhan Ekonomi, Ketidakmerataan Pendapatan dan Kemiskinan: Estimasi Parameter Elastisitas Kemiskinan Tingkat Provinsi Di Indonesia Tahun 1996-2005*”. www.google.com, diakses 4 Agustus 2010.
- Jaminan kesehatan Masyarakat . 2010. “*MDGs Tanggung Jawab Pemerintah Kepada Masyarakat*.” www.depkes.go.id, diakses 28 September 2010.
- Kapsos, Stephen. 2004. “*Estimating growth requirements for reducing working poverty: Can the world halve working poverty by 2015*” www.google.com , diakses 8 September 2009.
- Komisi Makroekonomi dan Kesehatan, 2001, *Laporan Komisi Makroekonomi dan Kesehatan*, Jakarta.
- Mankiw, N.Gregory. 2004. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Mudrajad Kuncoro. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nachrowi, D.Nachrowi. 2006. *Pendekatan Populer dan praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta : UI
- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- PNPM Mandiri. 2007. “*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*,http://www.pnpmmandiri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=105.www.pnpm-mandiri, diakses 27 September 2010.
- RAPBN 2010. 2010. “*BAB II Perkembangan Ekonomi dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2010*” www.google.com diakses 23 Agustus 2010.
- Retnadi, Joko. 2008. “*Kredit Usaha Rakyat (KUR), harapan , dan tantangan*.” *Economic Review*, No 212, Juni 2008.

- Setiawan, Sigit dan Handoko, Rudi. 2005. "Pertumbuhan Ekonomi 2006 : Suatu Estimasi dan Arah Pencapaian Pertumbuhan yang Merata dan Berkualitas." *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol.9, No.4.
- Siregar, Hermanto dan Wahyuniarti, Dwi. "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap penurunan Jumlah Penduduk Miskin." *www.google.com*, diakses 15 November 2009.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi kesembilan terjemahan Munandar, Haris. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahyuni, Tri. 2010. "Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli." *www.google.com*, diakses 28 September 2010.
- World Bank 2007. 2007. "Measuring Poverty" <http://go.worldbank.org/34GHPDUKV0> . *www.worldbank.org*, diakses 7 Desember 2009.

LAMPIRAN A :
REGRESI UTAMA

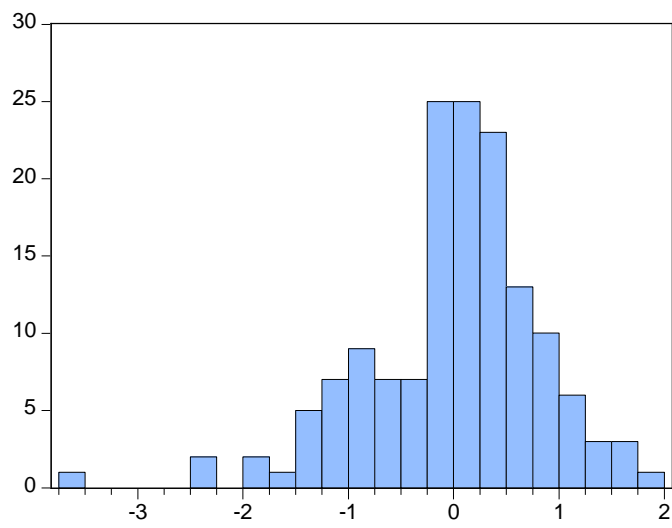
Uji Regresi Panel data Dengan Metode LSDV

Dependent Variable: KMSKN
 Method: Least Squares
 Date: 08/19/10 Time: 12:31
 Sample: 1 150
 Included observations: 150

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	120.0516	14.25594	8.421162	0.0000
PDRB	-3.88E-07	5.02E-08	-7.724840	0.0000
AHH	-1.410357	0.212059	-6.650785	0.0000
D2	6.622202	1.016597	6.514089	0.0000
D3	-6.034190	1.064850	-5.666704	0.0000
D4	-9.879351	1.080766	-9.141063	0.0000
D5	-2.095272	0.810982	-2.583624	0.0110
D6	-10.53160	1.144111	-9.205051	0.0000
D7	-0.702581	1.053775	-0.666728	0.5062
D8	0.446962	1.011156	0.442031	0.6593
D9	-0.486965	1.011055	-0.481641	0.6310
D10	-11.06789	1.028748	-10.75861	0.0000
D11	-9.332196	1.096544	-8.510554	0.0000
D12	2.167089	1.307864	1.656968	0.1002
D13	3.413262	1.533009	2.226512	0.0279
D14	-0.647775	1.061631	-0.610170	0.5429
D15	-18.28812	1.363911	-13.40858	0.0000
D16	-11.47804	1.206385	-9.514406	0.0000
D17	-7.801325	1.902027	-4.101584	0.0001
D18	1.322861	1.266205	1.044745	0.2983
D19	-11.60123	1.201453	-9.656002	0.0000
D20	-7.571841	1.171034	-6.465942	0.0000
D21	-22.33351	1.661003	-13.44579	0.0000
D22	2.685197	0.700790	3.831673	0.0002
D23	-6.140313	1.357055	-4.524733	0.0000
D24	-3.921037	1.253028	-3.129251	0.0022
D25	-6.377441	1.160580	-5.495044	0.0000
D26	-2.689830	1.171716	-2.295634	0.0235
D27	-0.774605	1.299378	0.596135	0.5522
D28	6.281123	1.227177	5.118353	0.0000
D29	-15.61646	1.371182	-11.38905	0.0000
D30	17.72334	1.029823	17.21009	0.0000
R-squared	0.989792	Mean dependent var		17.19453
Adjusted R-squared	0.987110	S.D. dependent var		8.300025
S.E. of regression	0.942329	Akaike info criterion		2.905791
Sum squared resid	104.7821	Schwarz criterion		3.548060
Log likelihood	-185.9343	Hannan-Quinn criter.		3.166725
F-statistic	369.0816	Durbin-Watson stat		1.772728
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN B :
UJI ASUMSI KLASIK

1. Deteksi Normalitas



Series: Residuals	
Sample 1 150	
Observations 150	
Mean	-4.13e-15
Median	0.082308
Maximum	1.764585
Minimum	-3.736409
Std. Dev.	0.838591
Skewness	-0.930110
Kurtosis	5.277533
Jarque-Bera	54.04735
Probability	0.000000

2. Deteksi Glejser

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	2.234818	Prob. F(31,118)	0.0011
Obs*R-squared	55.48878	Prob. Chi-Square(31)	0.0044
Scaled explained SS	56.03377	Prob. Chi-Square(31)	0.0038

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 08/19/10 Time: 12:51

Sample: 1 150

Included observations: 150

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-18.68131	7.728574	-2.417174	0.0572
PDRB	-2.37E-08	2.72E-08	-0.871095	0.3855
AHH	0.287857	0.114963	2.503902	0.0536
D2	0.920981	0.551128	1.671083	0.0974
D3	-0.376204	0.577287	-0.651676	0.5159
D4	-0.370854	0.585916	-0.632947	0.5280
D5	-0.834736	0.439658	-1.898605	0.0601
D6	-0.068164	0.620257	-0.109896	0.9127
D7	-0.173804	0.571283	-0.304234	0.7615
D8	-0.310035	0.548178	-0.565574	0.5728
D9	-0.409573	0.548123	-0.747228	0.4564
D10	-0.331759	0.557715	-0.594853	0.5531
D11	0.051418	0.594470	0.086493	0.9312
D12	-1.069378	0.709033	-1.508221	0.1342
D13	-1.719097	0.831090	-2.068484	0.0508
D14	-0.479242	0.575542	-0.832679	0.4067
D15	0.800577	0.739418	1.082713	0.2811
D16	-1.344084	0.654018	-2.055118	0.0521
D17	1.770615	1.031147	1.717132	0.0886
D18	0.636566	0.686448	0.927333	0.3556
D19	0.634358	0.651344	0.973922	0.3321
D20	-0.938754	0.634853	-1.478695	0.1419
D21	1.136515	0.900480	1.262120	0.2094
D22	-0.290194	0.379919	-0.763831	0.4465
D23	-0.859942	0.735701	-1.168874	0.2448
D24	0.715450	0.679304	1.053210	0.2944
D25	-0.820794	0.629186	-1.304533	0.1946
D26	0.153670	0.635223	0.241915	0.8093
D27	0.923841	0.704432	1.311469	0.1922
D28	0.343855	0.665290	0.516851	0.6062
D29	0.504842	0.743359	0.679136	0.4984
D30	0.594934	0.558298	1.065621	0.2888

R-squared	0.369925	Mean dependent var	0.610493
Adjusted R-squared	0.204397	S.D. dependent var	0.572741
S.E. of regression	0.510865	Akaike info criterion	1.681293
Sum squared resid	30.79600	Schwarz criterion	2.323562
Log likelihood	-94.09699	Hannan-Quinn criter.	1.942227
F-statistic	2.234818	Durbin-Watson stat	2.771284
Prob(F-statistic)	0.001083		

**Tabel
Auxiliary Regression**

Regresi	Persamaan	
	R ² Utama	R ² auxiliary regression
Regresi Utama Y=f(PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)	0.989792	
Regresi parsial:		
D2=(D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.822229
D3=(D2,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.837975
D4=(D2,D3,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30,D31 PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.842712
D5=(D2,D3,D4,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.720658
D6=(D2,D3,D4,D5,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.859647
D7=(D2,D3,D4,D5,D6,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.834552
D8=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.820311
D9=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.849149
D10=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.826404
D11=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.847206
D12=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.892593
D13=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.921825
D14=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.836991
D15=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.901239
D16=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.873763
D17=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.949216
D18=(D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30 PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.885419
D19=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.872724
D20=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.866027
D21=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.933409
D22=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.625904
D23=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.900238

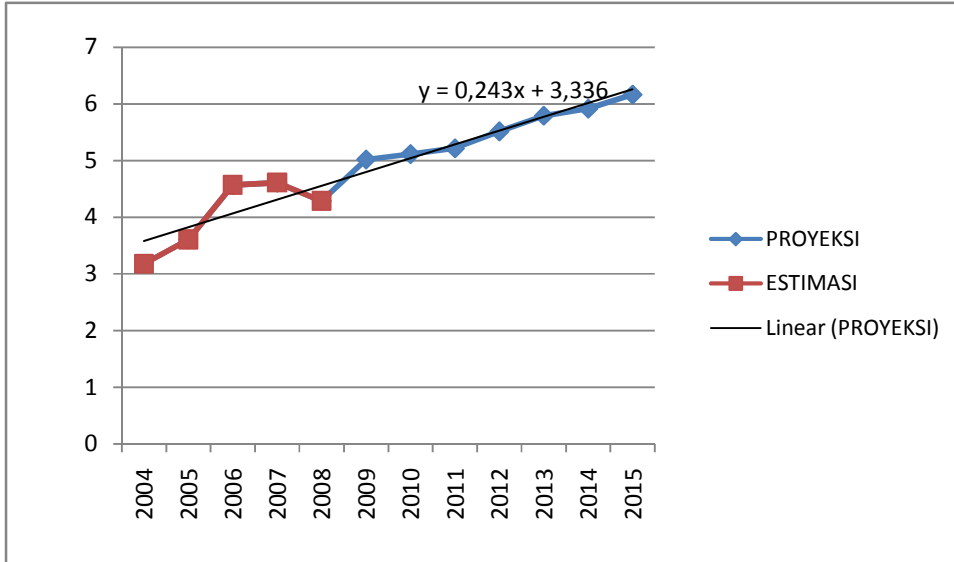
D24=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.882986
D25=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.863602
D26=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.866182
D27=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.891185
D28=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.878004
D29=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.902284
D30=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita,Angka Harapan Hidup)		0.826766
PDRBperkapita=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30,Angka Harapan Hidup)		0.958111
AngkaHarapanHidup=(D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30, PDRB perkapita)		0.983836

Sumber : Output Pengolahan Data dengan Program Eviews 6.0

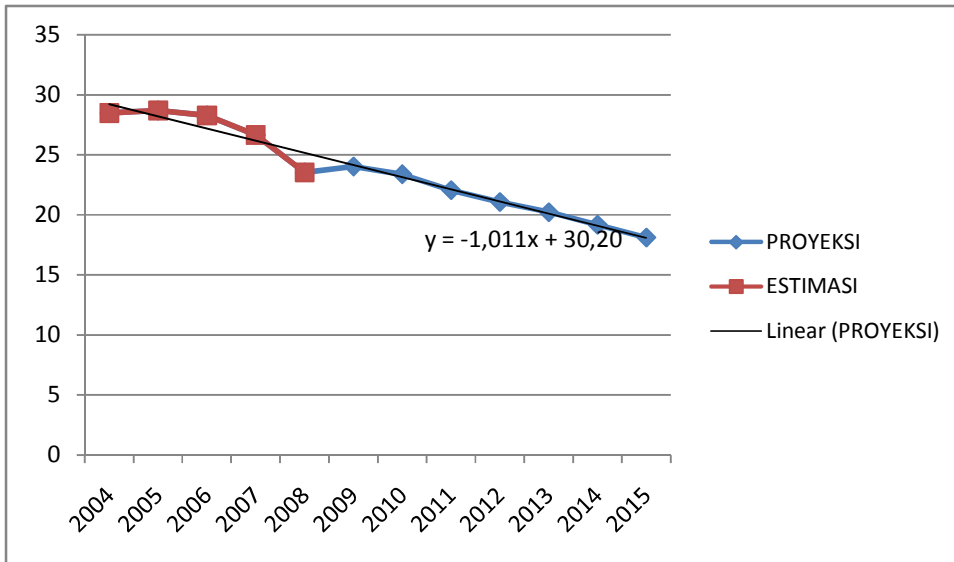
Persamaan yang terkena multikolinieritas, yaitu R^2 regresi utama < R^2 auxiliary regression

LAMPIRAN D
PROYEKSI

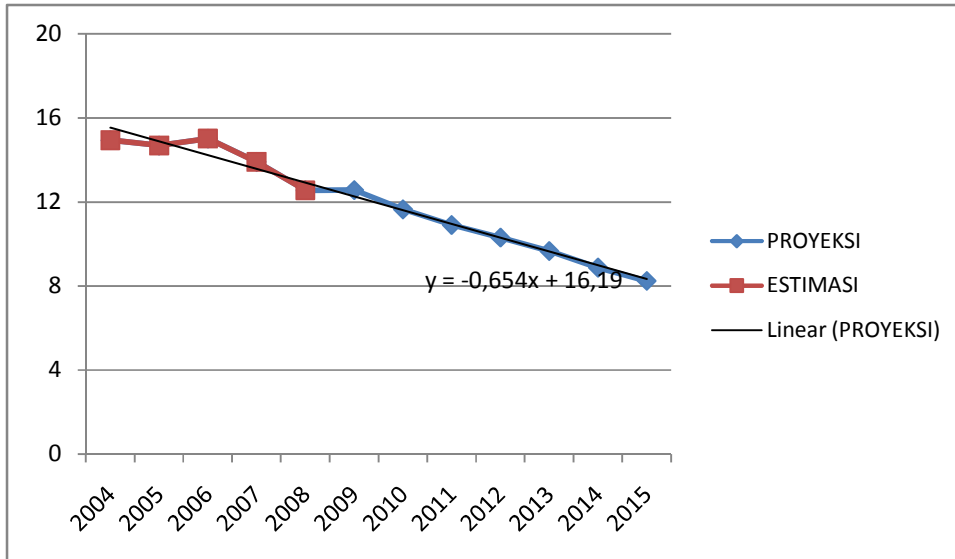
Kemiskinan 1



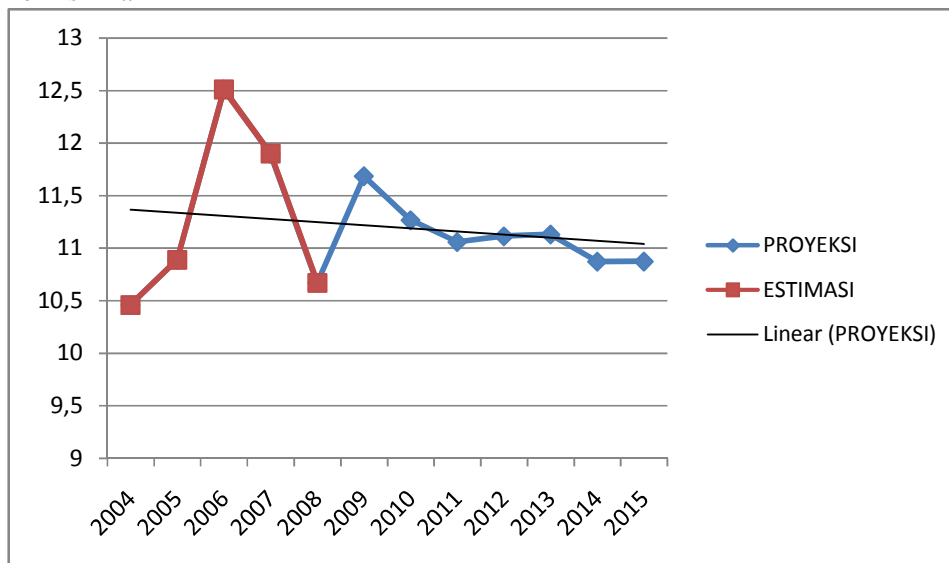
Kemiskinan 2



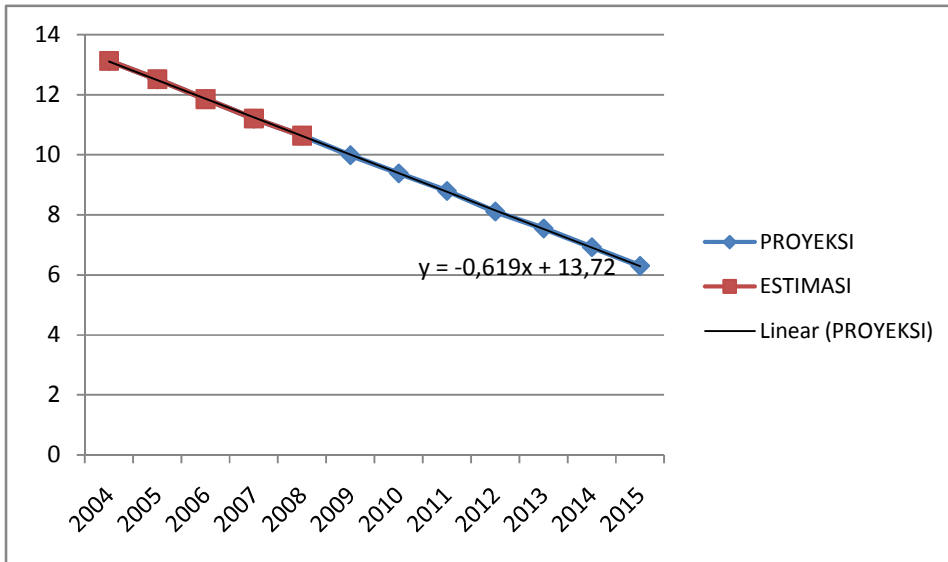
Kemiskinan 3



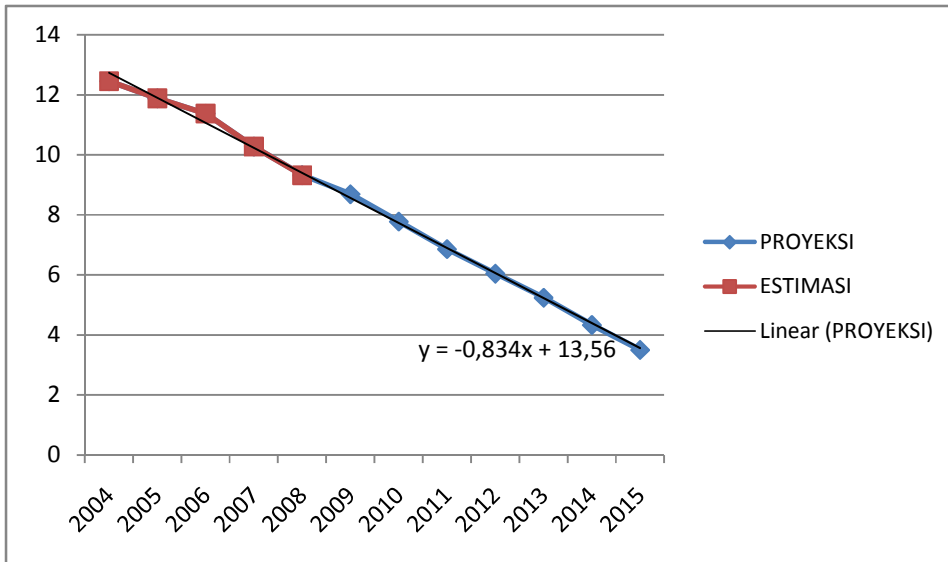
Kemiskinan 4



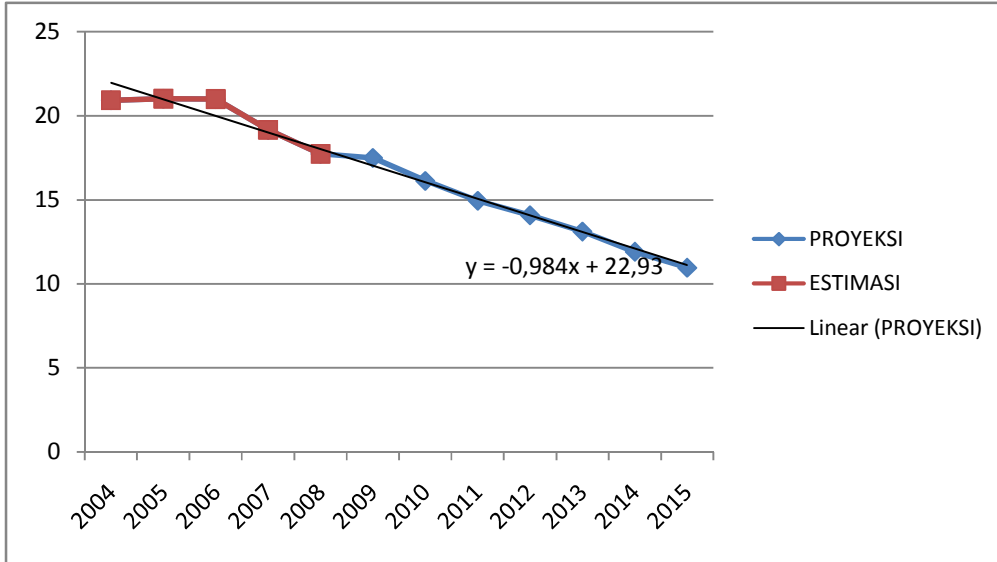
Kemiskinan 5



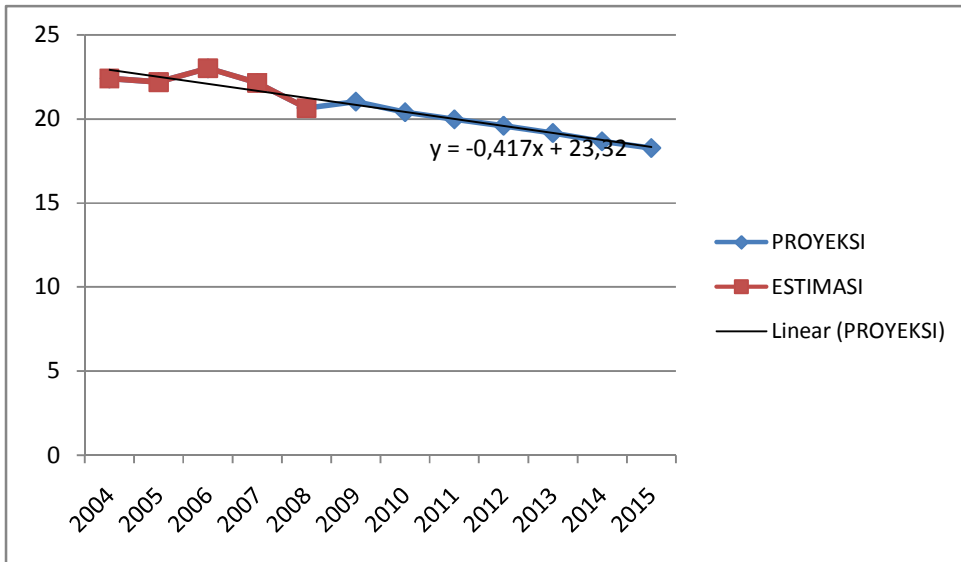
Kemiskinan 6



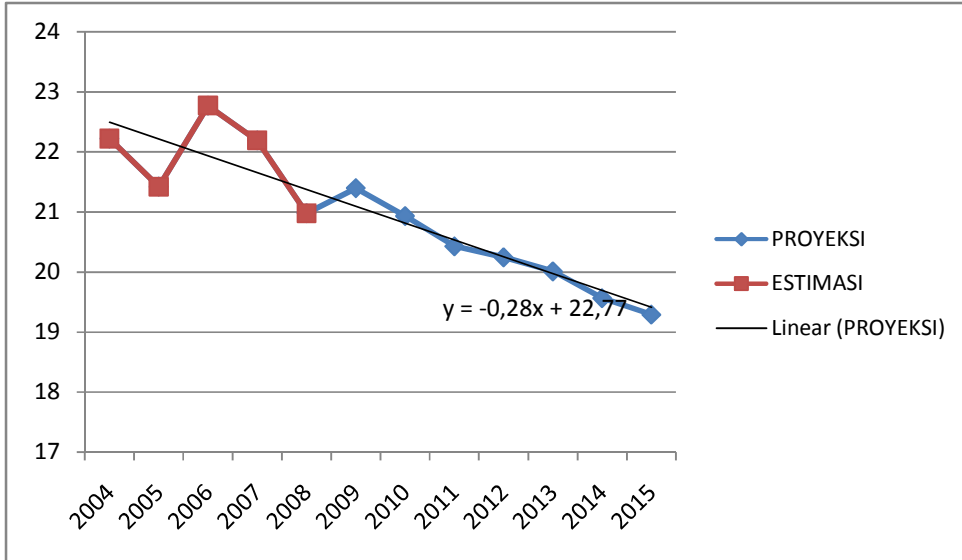
Kemiskinan 7



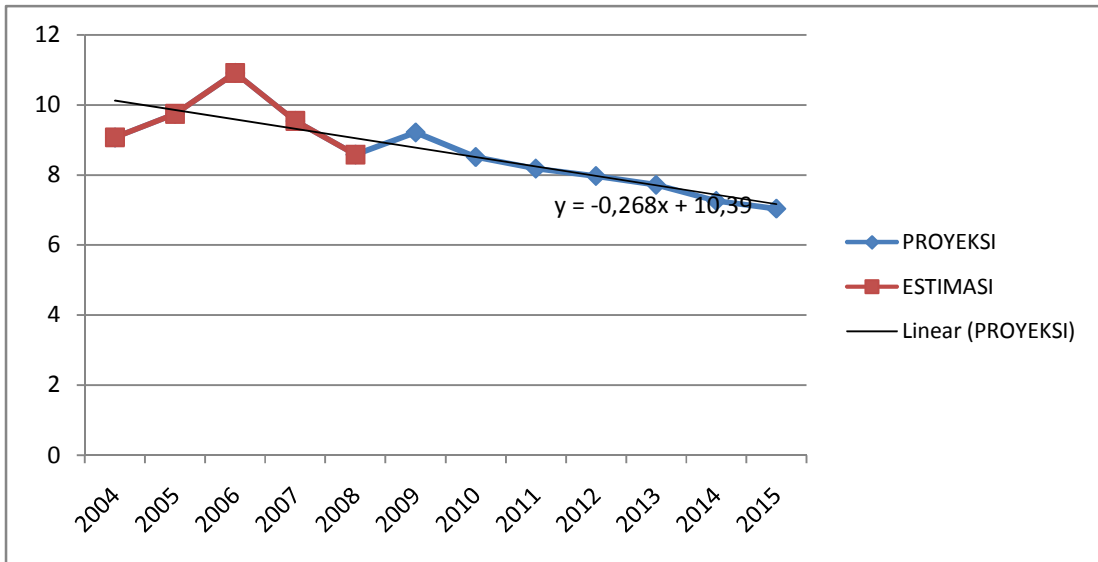
Kemiskinan 8



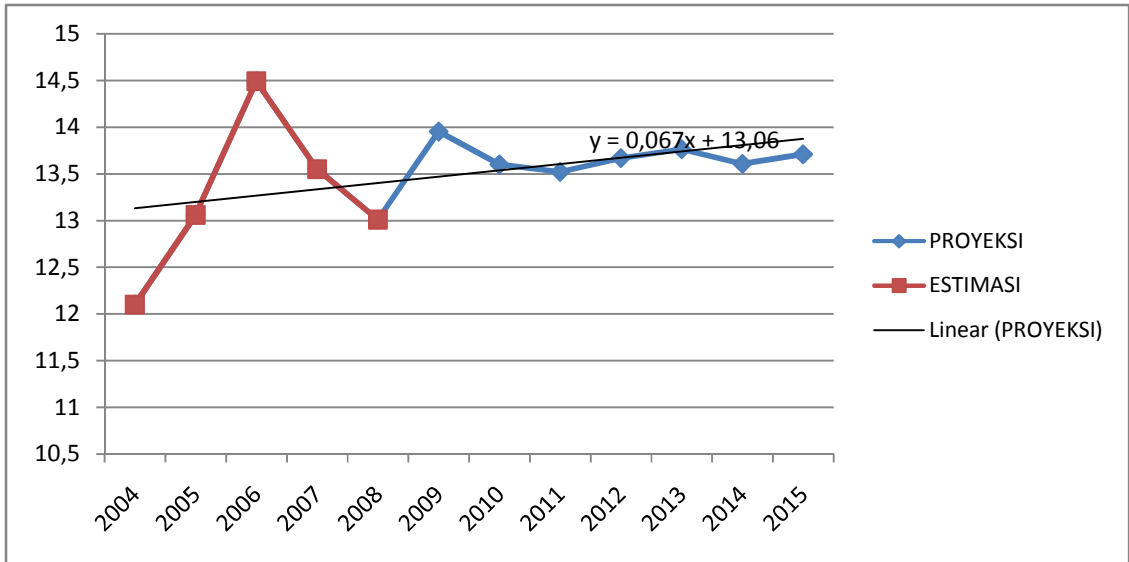
Kemiskinan 9



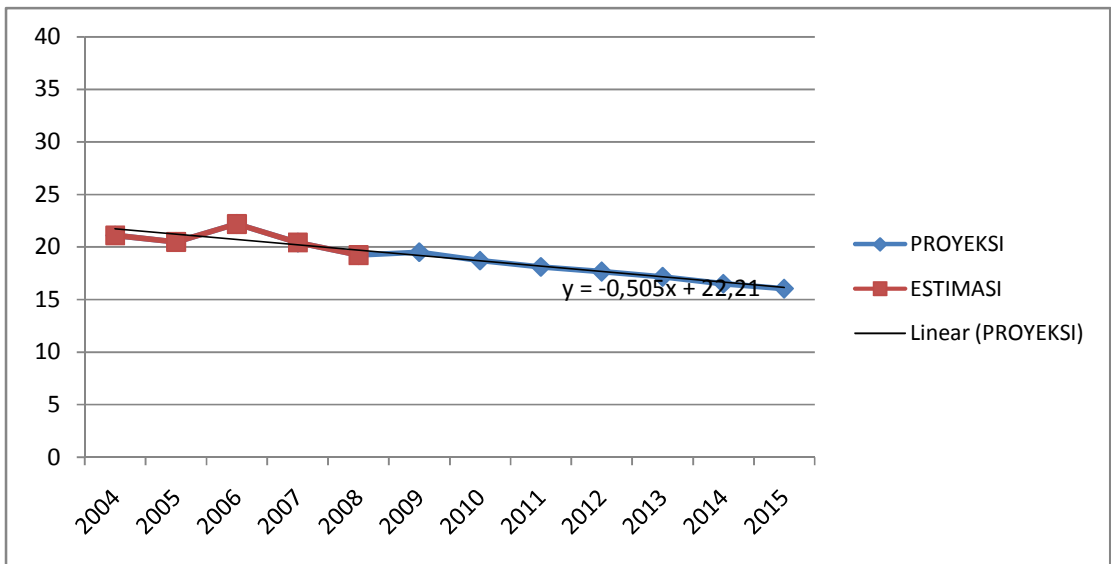
Kemiskinan 10



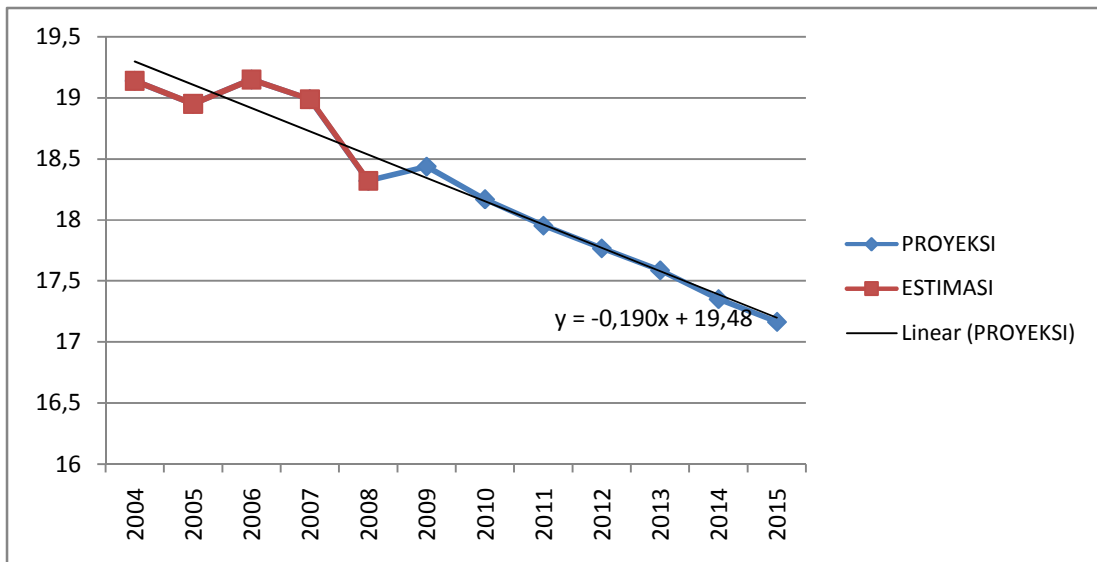
Kemiskinan 11



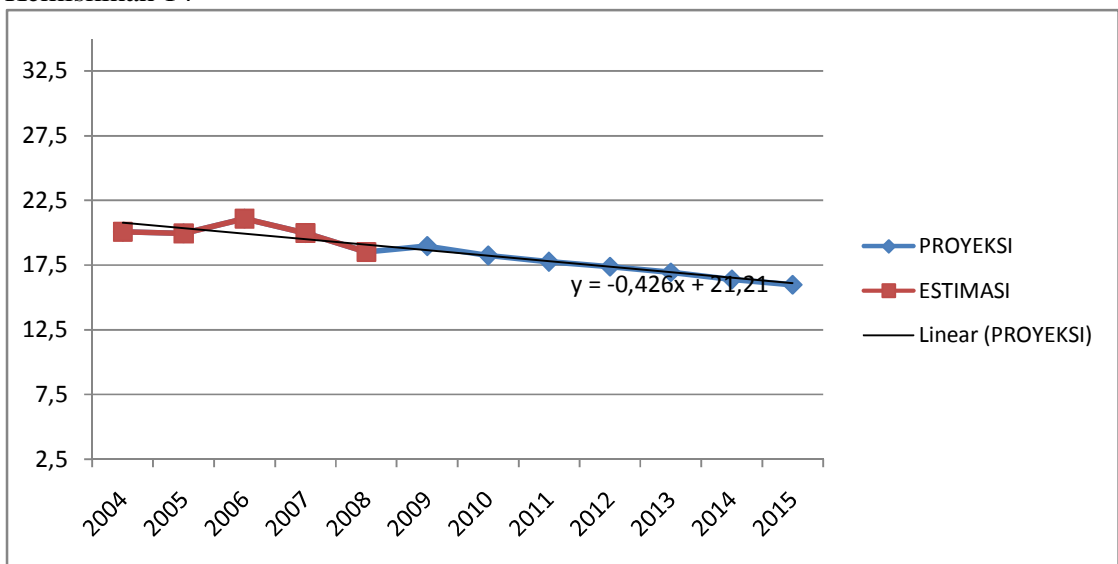
Kemiskinan 12



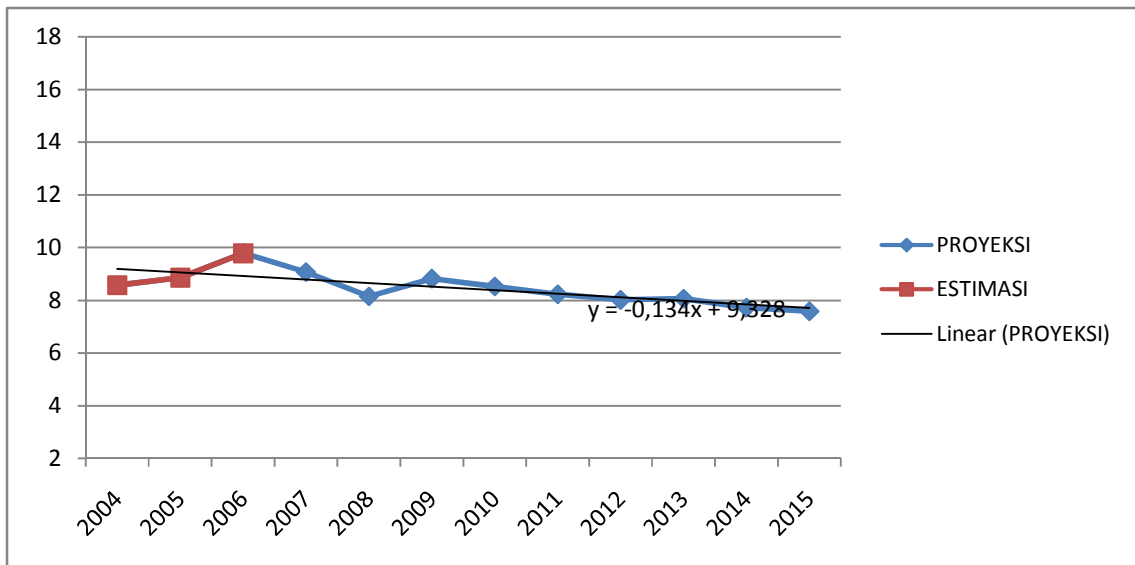
Kemiskinan 13



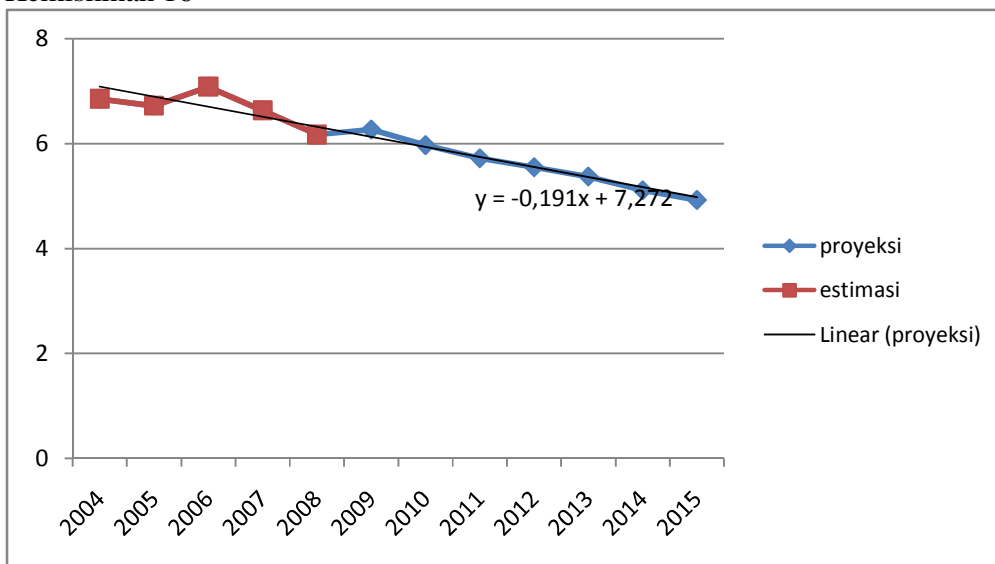
Kemiskinan 14



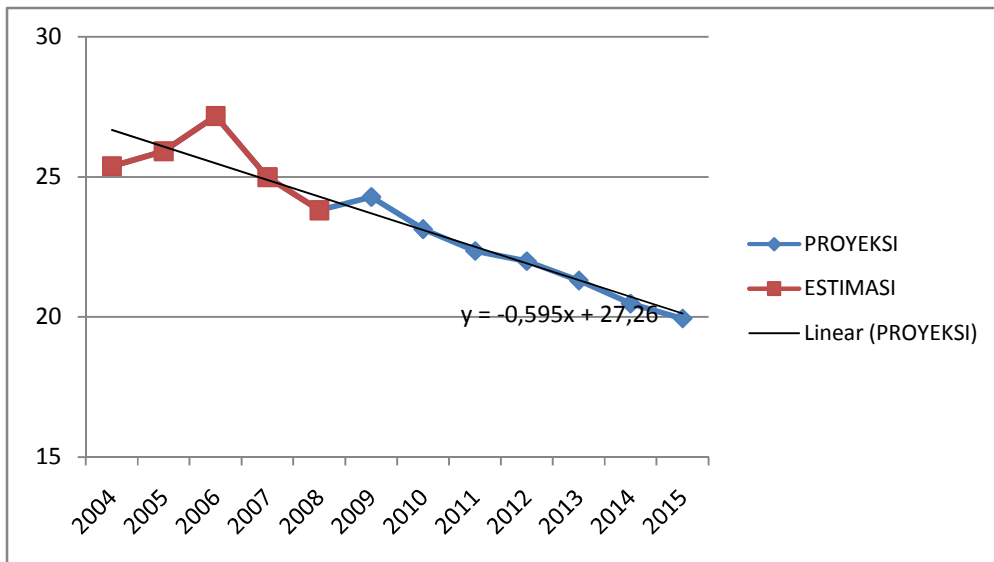
Kemiskinan 15



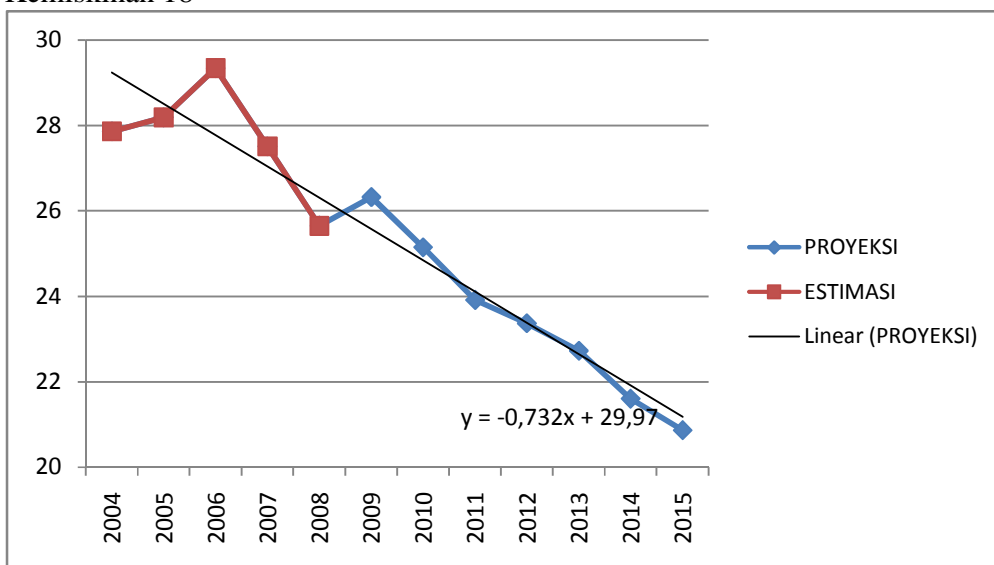
Kemiskinan 16



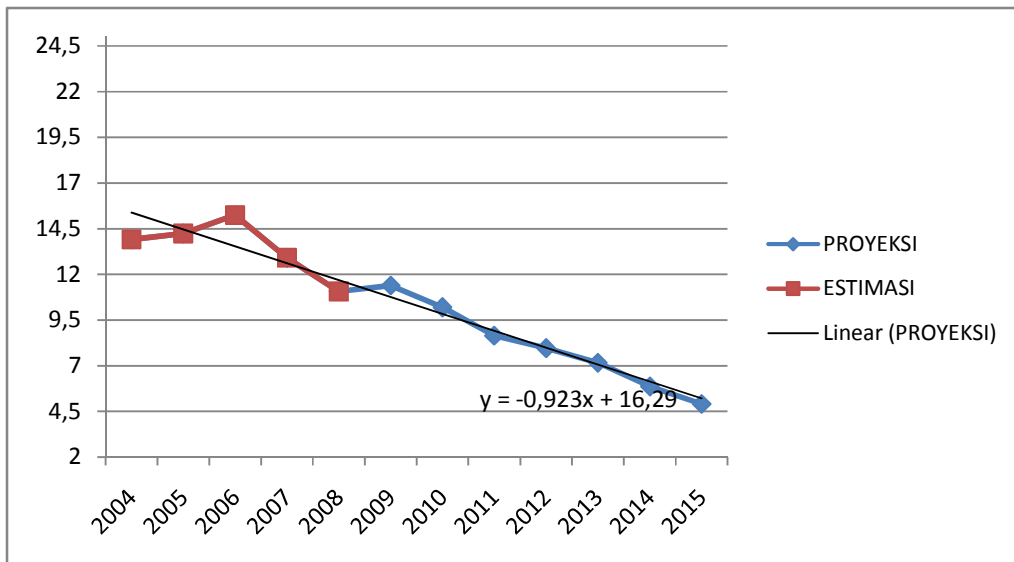
Kemiskinan 17



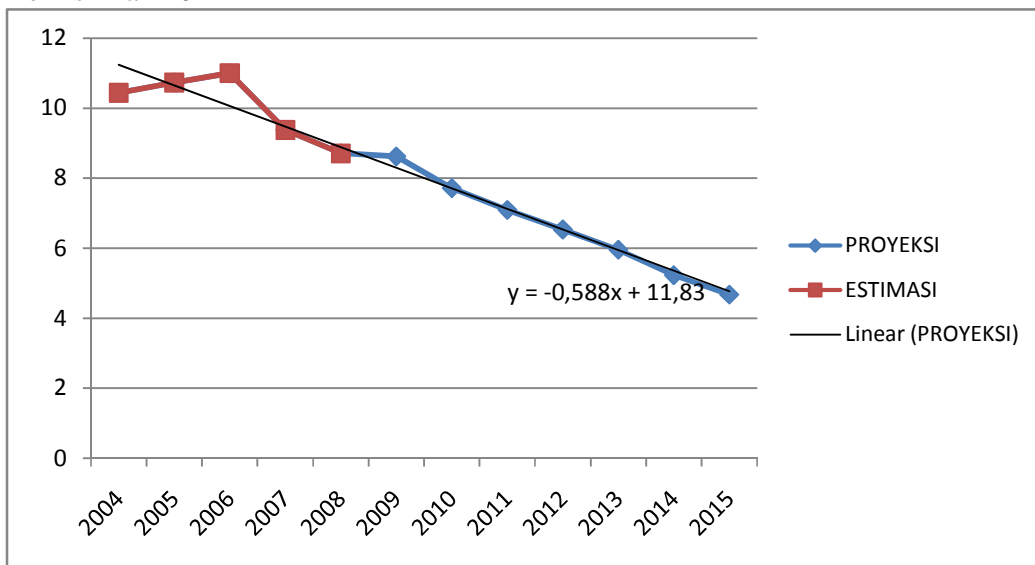
Kemiskinan 18



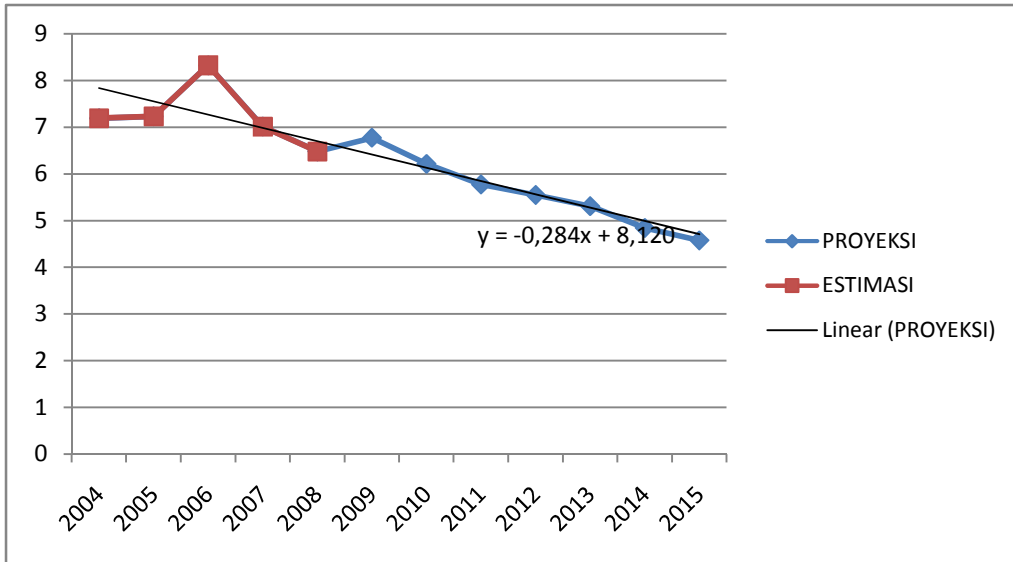
Kemiskinan 19



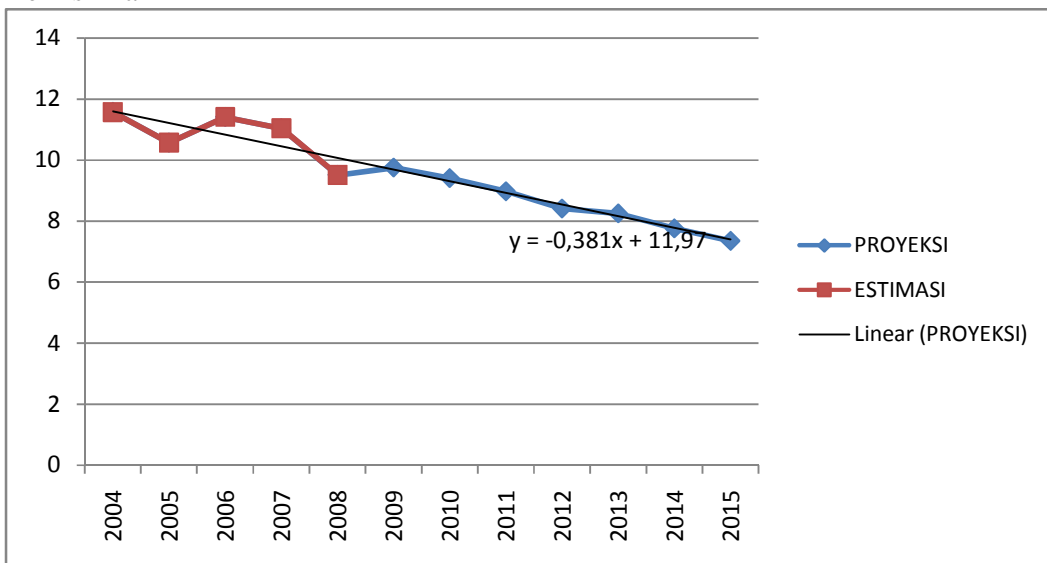
Kemiskinan 20



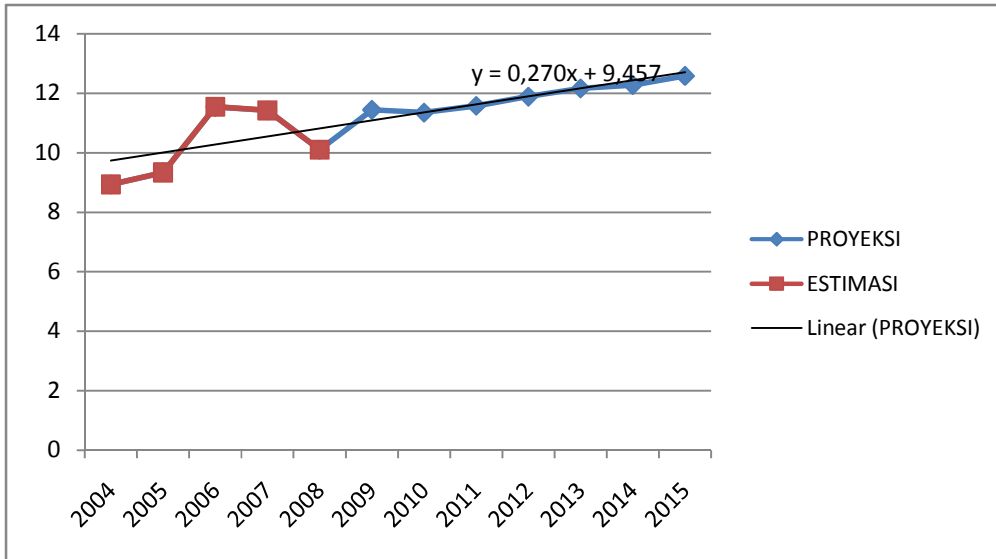
Kemiskinan 21



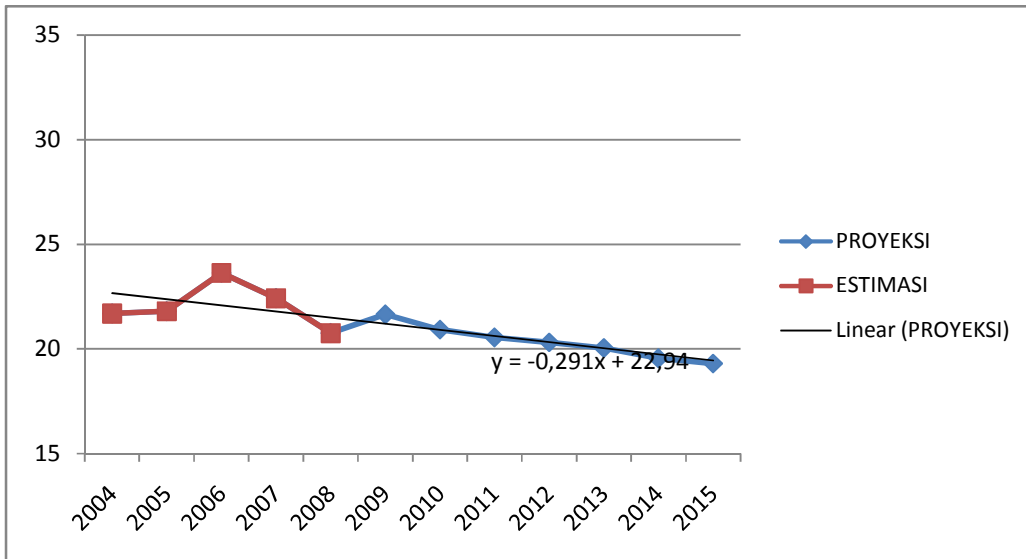
Kemiskinan 22



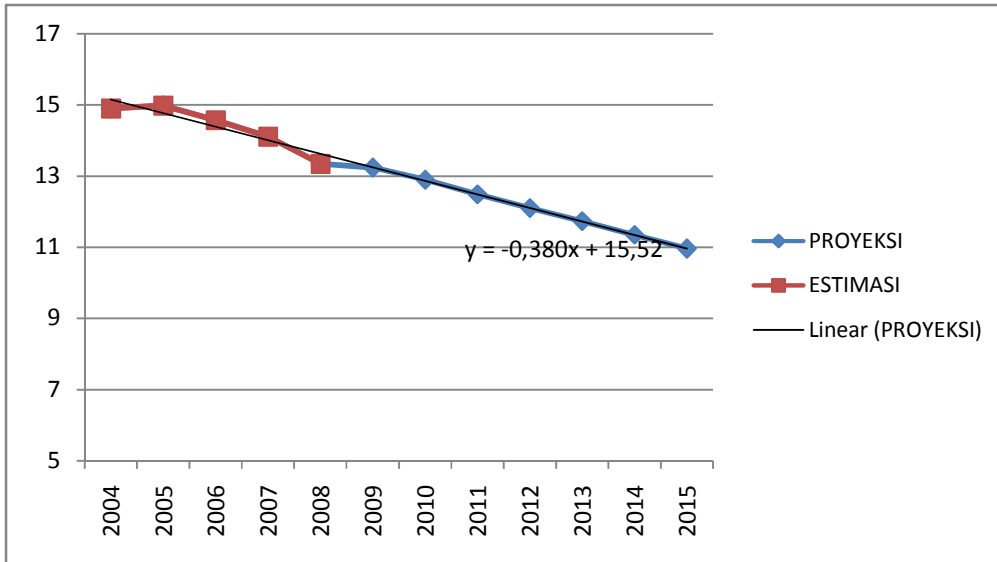
Kemiskinan 23



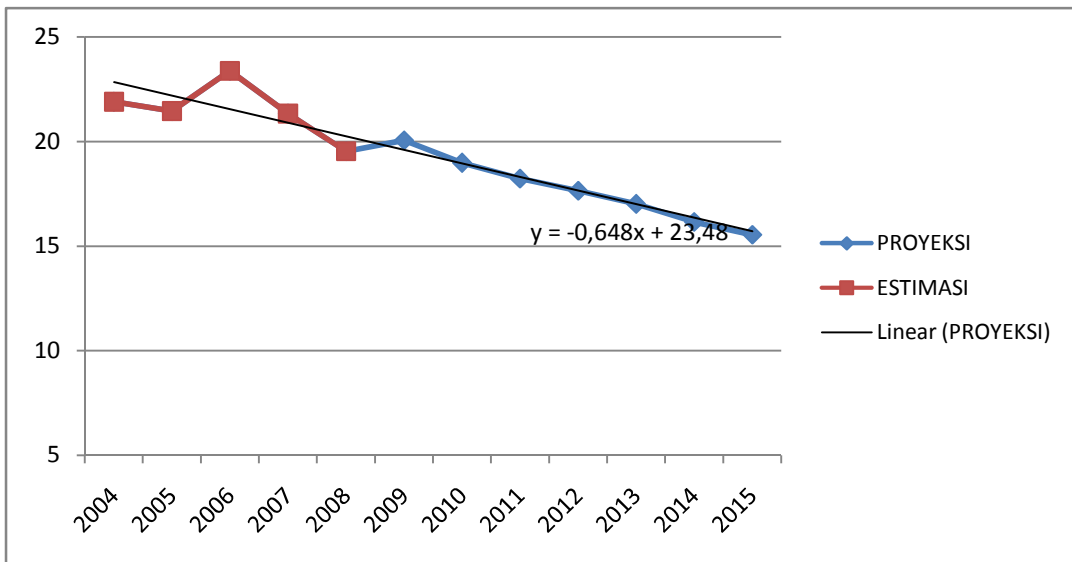
Kemiskinan 24



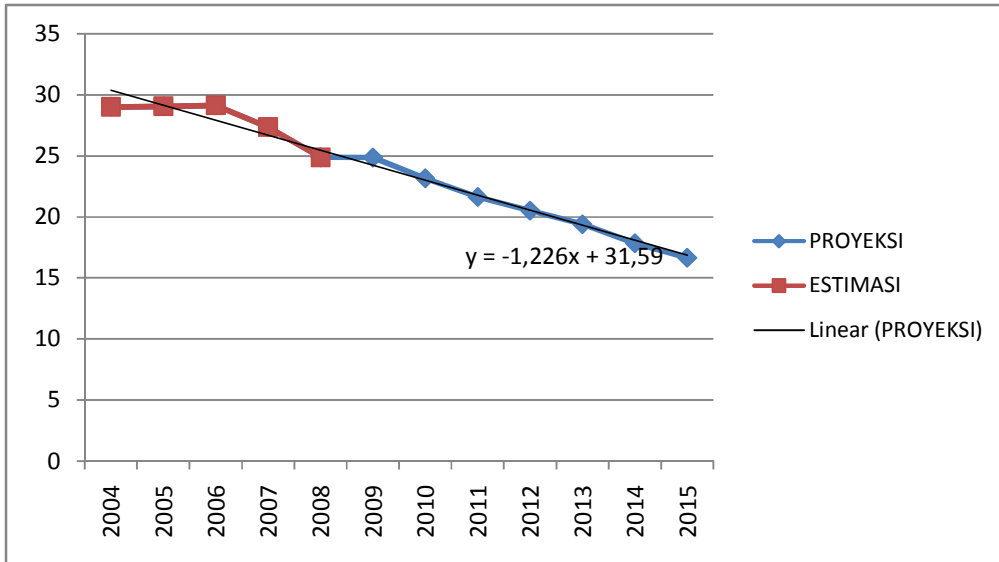
Kemiskinan 25



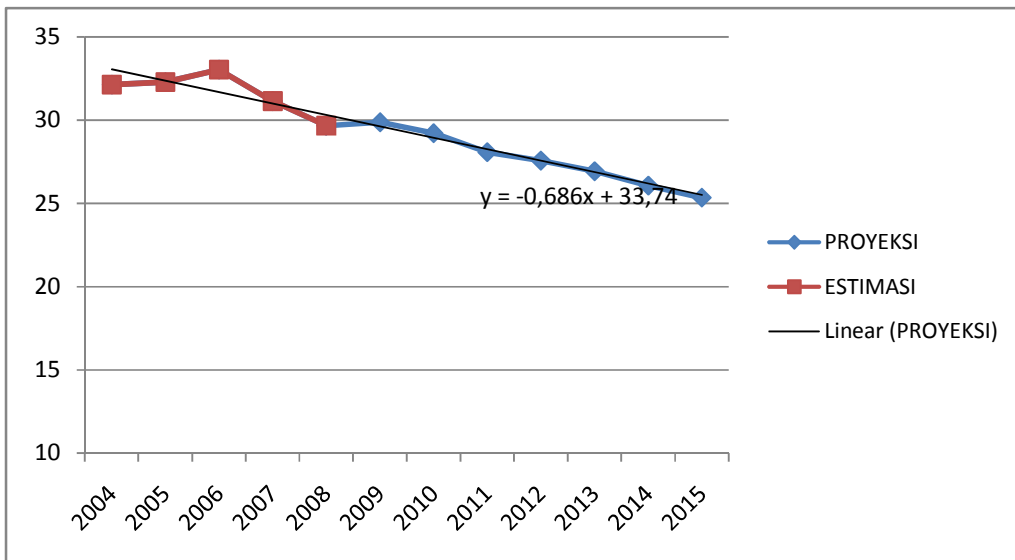
Kemiskinan 26



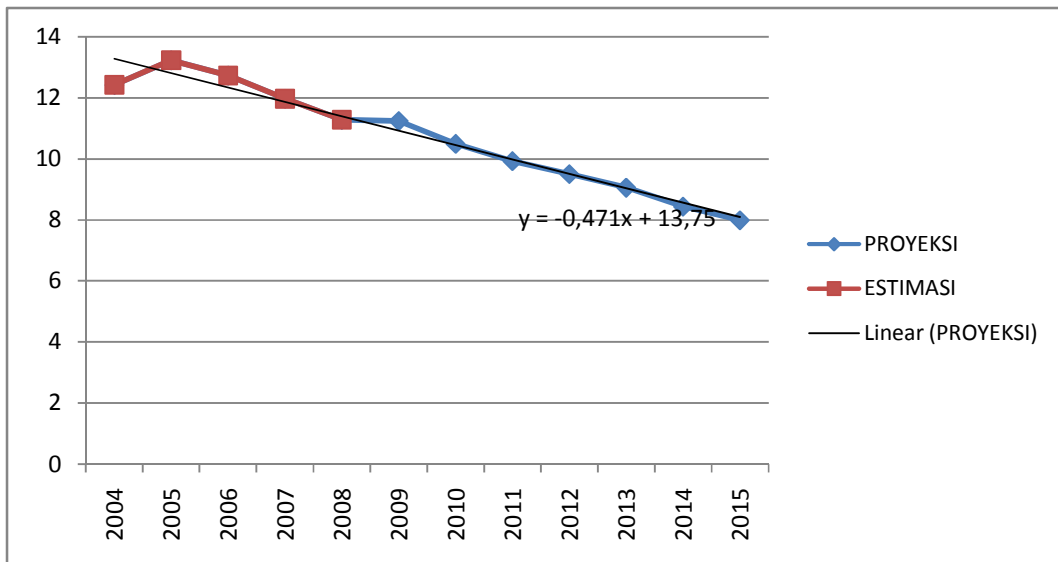
Kemiskinan 27



Kemiskinan 28



Kemiskinan 29



Kemiskinan 30

